

Kredit Perdesaan di Kabupaten Tanggamus Lampung

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu Tim SMERU dan tidak berhubungan atau mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-3909317, 3909363, 3901221, faks: 62-21-3907818, web: www.smeru.or.id atau e-mail: smeru@smeru.or.id.

**Pamadi Wibowo
Wawan Munawar**

Laporan khusus dari Social Monitoring & Early Response Unit (SMERU). Suatu unit yang didukung oleh Bank Dunia, AusAID, ASEM, dan USAID.

FINAL
September 2000

PENGANTAR

Laporan lapangan (Field Report) dari **Kabupaten Tanggamus - Lampung** ini merupakan bagian dari Studi Tim Dampak Krisis SMERU tentang Kredit Perdesaan yang mewakili komunitas petani sawah dan nelayan. Wilayah lain yang juga diamati termasuk Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara (perkebunan), Kabupaten Kupang - NTT (lahan kering), dan Kabupaten Cirebon - Jawa Barat (nelayan dan petani sawah).

Studi yang diselenggarakan pada bulan Juni 2000 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang keberadaan perkreditan di wilayah perdesaan
2. Mengetahui perubahan keberadaan kredit perdesaan sebagai akibat krisis ekonomi
3. Memberikan masukan tentang jenis kredit yang diminati masyarakat perdesaan; dan
4. Mengetahui kiat penanggulangan dalam masa krisis berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat desa pada kredit perdesaan

Studi dilakukan oleh para peneliti Tim Dampak Krisis SMERU, dua peneliti di setiap kabupaten, yang langsung menggali informasi di lapangan (desa, kecamatan, dan kabupaten) selama kurang lebih tiga minggu. Studi literatur juga dilakukan sebelum Tim SMERU berangkat ke lapangan.

Laporan lengkap tentang Kredit Perdesaan dari keempat wilayah akan diterbitkan sebagai Laporan Khusus SMERU.

Jakarta, Juli 2000

Koordinator Tim dampak Krisis SMERU

John Maxwell

DAFTAR SINGKATAN

APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappeda	=	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BKKBN	=	Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional
BNI	=	Bank Nasional Indonesia
BPS	=	Badan Pusat Statistik
BPPC	=	Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh
BPD	=	Bank Pembangunan Daerah
BRI	=	Bank Rakyat Indonesia
Golbertap	=	Golongan Berpenghasilan Tetap
IDT	=	Inpres Desa Tertinggal
IPTW	=	Insentif Pembayaran Tepat Waktu
<i>Jaseng</i>	=	Jawa-Serang
KOPPAS	=	Koperasi Pedagang Pasar
KK	=	Kepala Keluarga
KPS	=	Keluarga Pra Sejahtera
<i>Krismon</i>	=	Krisis Moneter
KS-I	=	Keluarga Sejahtera I
KTP	=	Kartu Tanda Penduduk
KUD	=	Koperasi Unit Desa
KUPEDES	=	Kredit Usaha Perdesaan
LKMD	=	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LSM	=	Lembaga Swadaya Masyarakat
MT	=	Musim Tanam
OPK	=	Operasi Pasar Khusus
PDM-DKE	=	Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi
PKD	=	Padat Karya Desa
PLN	=	Perusahaan Listrik Negara
PNS	=	Pegawai Negeri Sipil
PPI	=	Pelabuhan Perikanan Indonesia
PPK	=	Program Pengembangan Kecamatan
PPL	=	Petugas Penyuluh Lapangan
PLKB	=	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
PPKBD	=	Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa
Puskesmas	=	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAT	=	Rapat Anggota Tahunan
RT	=	Rukun Tetangga
RW	=	Rukun Warga
SD	=	Sekolah Dasar
SHU	=	Sisa Hasil Usaha
SITU	=	Surat Ijin Tempat Usaha
SMERU	=	<i>Social Monitoring and Early Response Unit</i>
SMU (N)	=	Sekolah Menengah Umum (Negeri)
SK	=	Surat Keputusan
SKT	=	Surat Keterangan Tanah
SLTP	=	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
TPI	=	Tempat Pelelangan Ikan
UDO	=	<i>Unit Desa Officer</i>
USPS	=	Unit Simpan Pinjam Syariah

DAFTAR TABEL & KOTAK

Tabel 1. Wilayah Pengamatan di Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung

Tabel 2. Sumber Informasi

Tabel 3. Jenis Mata pencaharian Penduduk Kecamatan Talang Padang

Tabel 4. Struktur Sosial-Ekonomi Masyarakat di 3 Desa Amatan

Kotak 1. Haji Payang

Kotak 2. Hadi, Pengusaha Ikan Asin dan Pindang

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Pengantar	i
Daftar Singkatan	ii
Daftar Tabel & Kotak	iii
Daftar Isi	iv
I Pendahuluan	1
Metodologi	1
II Gambaran Umum Wilayah Pengamatan	3
2.1. Kabupaten Tanggamus	3
2.1.1. Kecamatan Kota Agung	3
▪ Lokasi Pengamatan: Komunitas Nelayan	4
Dusun Kapuran, Kelurahan Pasar Madang	4
Desa Karang Buah, Kecamatan Cukuh Balak	5
2.1.2. Kecamatan Talang Padang	6
▪ Lokasi Pengamatan: Komunitas Petani Lahan Basah	7
Desa Kalibening	7
2.2. Struktur Sosial-Ekonomi Desa	8
2.3. Dinamika Masyarakat pada Masa Krisis	10
III Kredit Perdesaan dan Pilihan Masyarakat	15
3.1. Skema Kredit Perdesaan	15
3.1.1. Kredit Formal	17
3.1.2. Kredit Informal	23
3.1.3. Kredit Program	28
3.2. Akses dan Pilihan Masyarakat terhadap Kredit Perdesaan	29
3.2.1. Akses	29
3.2.2. Hambatan	29
3.2.3. Pilihan	30
IV Kredit di Masa Krisis	31
4.1. Kebutuhan Kredit Masa Krisis	35
4.1.1. Kebutuhan Kredit di Komunitas Nelayan	36
4.1.2. Kebutuhan Kredit di Komunitas Petani Lahan Basah	38
4.1.3. Ketergantungan Nelayan dan Petani pada Kredit Informal	38
V Kesimpulan	39
5.1. Dampak Krisis terhadap Keberadaan Kredit Perdesaan	39
5.2. Jenis Kredit yang Diminati Masyarakat	40
Lampiran	

I PENDAHULUAN

Metodologi

Studi pengamatan terhadap kredit perdesaan ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data secara cepat. Instrumen pengumpulan data dalam studi ini adalah: i) wawancara mendalam dan semi-mendalam (dengan memanfaatkan *interview guidelines*); ii) *Focus Group Discussion* (FGD); serta iii) observasi. Selain itu, untuk melengkapi data yang diperlukan, pengamatan ini juga melaksanakan kajian data sekunder yang dilakukan sebelum dan pada saat pengamatan berlangsung.

1. Pemilihan Lokasi

- Tingkat Propinsi. **Propinsi Lampung** dipilih sebagai salah satu wilayah pengamatan berdasarkan data Hasil Survey Nasional Kecamatan yang menyimpulkan bahwa Propinsi Lampung termasuk dalam kategori wilayah yang tidak terlalu terpuak oleh dampak krisis ekonomi¹. Propinsi ini juga dipilih untuk mewakili wilayah luar Jawa dan wilayah Indonesia Bagian Barat.
- Tingkat Kabupaten. **Kabupaten Tanggamus** telah dipilih sebagai wilayah pengamatan yang tidak terlalu terpuak oleh dampak krisis ekonomi (dibanding kabupaten lain di Propinsi Lampung). Kabupaten ini juga dipilih untuk mewakili wilayah pertanian lahan basah dan pesisir.
- Tingkat Kecamatan. Penentuan sampel wilayah kecamatan dilakukan setelah Tim SMERU berada di lapangan, khususnya setelah mendapat informasi dari instansi Pemda dan Bappeda serta data BPS (baik propinsi maupun kabupaten).
- Tingkat Kelurahan/Desa. Penentuan sampel kelurahan/desa juga dilakukan di lapangan. Kriteria utama dalam pemilihan wilayah di sini adalah keterwakilan daerah pesisir (komunitas nelayan) dan daerah pertanian lahan basah (komunitas petani). Dalam pelaksanaan pengamatan ini, di setiap kabupaten diambil 2 desa sampel dari wilayah kecamatan yang sama atau kecamatan berbeda. Tetapi untuk Kabupaten Tanggamus telah diambil 3 desa sampel di 3 kecamatan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh informasi tambahan sekaligus pembandingan. Desa ketiga (pembandingan) yang diambil adalah Desa Karang Buah (Kec. Cukuh Balak) yang terletak di pulau Tabuan. Lokasinya cukup terpencil dan relatif sulit dijangkau oleh fasilitas layanan lembaga keuangan formal (bank atau koperasi). Perekonomian desa ini bertumpu pada pertanian, perkebunan dan perikanan. Informasi yang diperoleh dari desa ini digunakan sebagai pembandingan dari desa nelayan (Pasar Madang) yang terletak di kecamatan Kota Agung (lihat Tabel 1)

2. Waktu Pelaksanaan Pengamatan

Pengamatan lapangan dilakukan selama 2 minggu pada pertengahan bulan Juni 2000, dengan mengumpulkan berbagai informasi, baik berupa data primer maupun data sekunder.

¹ Sudarno Sumarto, Anna Wetterberg, dan Lant Pritchett, *Dampak Sosial dari Krisis di Indonesia: Hasil Survei Nasional Kecamatan*, 1998

3. Sumber Informasi dan Responden/Informan Pengamatan

Informasi diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari propinsi, kabupaten kecamatan, hingga tingkat desa. Di tingkat propinsi Tim SMERU mengunjungi Kantor Pemda dan Bappeda (Bagian/Biro Ekonomi dan Pemerintahan Desa), BPS Propinsi, serta BNI Propinsi Lampung. Di tingkat kabupaten, informasi diperoleh dari Kantor Pemda (Dinas Perikanan, Koperasi, Pertanian) dan Bappeda, dan Kantor Cabang BNI. Di tingkat kecamatan, yang menjadi sumber informasi adalah Camat/Sekretaris Kecamatan, petugas BKKBN, KUD, LSM. Di tingkat desa dilakukan wawancara dengan Kepala Desa, Ketua LKMD, tokoh masyarakat, Pimpinan/staf Koperasi, dan responden.

Pemilihan responden dilakukan secara sengaja/purposif serta proporsional berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan; sedangkan distribusi jumlahnya berdasarkan pada kriteria: i) kelompok peminjam dan non peminjam; ii) peminjam dari kredit formal dan informal.

Tabel 1. Wilayah Pengamatan di Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung

Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Karakteristik
Lampung	Tanggamus	Kota Agung	Kel. Pasar Madang/ Dusun Kapuran	Pesisir, komunitas nelayan
		Talang Padang	Ds. Kalibening	Pertanian lahan basah, komunitas petani
		Cukuh Balak	Ds. Karang Buah	Pulau, komunitas perkebunan & nelayan

Tabel 2. Sumber Informasi

Sumber Informasi	Tingkat Propinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kecamatan/Desa
Responden	1. Pemda, Bappeda (Bagian/Biro Ekonomi, Pemerintahan desa) 2. BRI 3. BPS Propinsi	1. Pemda, Bappeda (Bag/Biro Ekonomi, Pemerintahan desa) 2. Dinas Teknis (Pertanian, Koperasi, Perikanan) 3. Cabang BRI 4. BPS Kabupaten	1. Camat/Sek.Cam/Kaur Ekonomi 2. Kades/Sekdes 3. Tokoh masyarakat 4. BRI Unit Desa 5. Ketua Koperasi/Staf 6. LSM <u>Responden</u> 1. Pemilik kapal 2. Pengusaha pengolahan ikan; Pengusaha penggilingan padi 3. Pedagang pengumpul hasil laut 4. Pedagang pengumpul hasil pertanian/tengkulak 5. Nelayan (ikan dan udang) 6. Petani (pemilik sawah, penggarap, buruh tani) 7. Pemilik warung/kios 8. Pelepas uang 9. Ketua Kelompok Tani 0. Pengurus kelompok arisan

II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENGAMATAN

2.1. Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung diresmikan sekitar 3 tahun yang lalu. Kabupaten ini semula masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan yang beribukota di Kalianda. Berdasarkan UU No. 2/Tahun 1997 Tanggamus ditetapkan sebagai kabupaten. Kabupaten dengan luas 3.356,61 Km² ini mempunyai 10 kecamatan, 7 kecamatan perwakilan, 3 kelurahan, 300 desa, serta 4 desa persiapan. Kondisi topografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi (berbukit dan bergunung).

Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus 809.585 jiwa (1998), terdiri dari laki-laki 410.247 jiwa dan perempuan 399.338 jiwa. Sektor agraris (pertanian, perkebunan dan perikanan) masih merupakan tulang punggung perekonomian kabupaten ini.

Pada saat pengamatan dilakukan, proses pemisahan administrasi pemerintahan dengan Kabupaten Lampung Selatan masih berlangsung sehingga kegiatan administratif di sejumlah instansi Pemda belum optimal. Misalnya Kantor Dinas Koperasi, hanya merupakan kantor perwakilan (sementara) koperasi Lampung Selatan dengan kondisi yang minim sehingga tidak dapat memberikan data dan informasi yang memadai tentang aspek perkoperasian setempat.

2.1.1 Kecamatan Kota Agung

Kecamatan Kota Agung dengan luas wilayah 436,85 Km² merupakan kecamatan ibukota kabupaten. Kecamatan ini terletak sekitar 100 km di Barat ibukota propinsi Bandar Lampung. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 59,9 Meter di atas permukaan laut. Aksesibilitas ke wilayah ini tergolong baik. Prasarana jalan memadai dan sarana transportasi umum relatif mudah diperoleh sepanjang pagi hingga sore hari.

Secara administratif kecamatan ini terbagi dalam dua wilayah, yaitu Kecamatan Induk Kota Agung dan Kecamatan Perwakilan Pematang Sawah. Kedua kecamatan itu terdiri dari 45 kelurahan/desa, 18 desa di antaranya berstatus desa tertinggal (10 desa di kecamatan induk dan 8 desa lainnya di kecamatan perwakilan).

Dibandingkan dengan misalnya, Kecamatan Pringsewu², secara umum infrastruktur sosial-ekonomi Kota Agung sebagai ibukota kabupaten masih belum memadai. Lembaga keuangan yang tersedia hanyalah BRI Unit Desa dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Tidak ditemui kantor cabang bank swasta atau BPR. Minimnya lembaga perbankan menyebabkan peminjam kredit asal Kota Agung harus ke Pringsewu untuk mengurus administrasi pinjaman dan pencairan dana pinjaman. Khususnya untuk pinjaman di atas Rp. 30 juta.

² Pringsewu adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Tanggamus yang sejak masa kolonial Belanda merupakan salah satu lokasi transmigrasi pekerja perkebunan asal Jawa. Kini, kecamatan ini sudah berkembang menjadi sebuah kota cukup besar dan ramai, dengan mayoritas penduduk Jawa. Setelah hampir seabad bermukim di kawasan itu, para transmigran ini telah menyebar ke berbagai daerah di Kabupaten Tanggamus. Pengaruh budaya Jawa di wilayah Tanggamus dapat dicermati dari nama-nama kecamatan dan desa yang menggunakan nama kecamatan dan desa di Jawa. Pada saat pengamatan berlangsung, Pringsewu sudah mempunyai Kantor Cabang BRI dan Bank Danamon.

Indikasi lain dari masih kurang memadainya infrastruktur sosial-ekonomi ibukota kabupaten ini juga tampak dari tidak adanya lembaga pendidikan tinggi di Kota Agung. Jumlah sekolah yang ada adalah 3 SMU (1 SMUN dan 2 SMU swasta), 8 SLTP (4 Negeri dan 4 Swasta), serta 66 SD (62 Negeri dan 4 swasta).

Nuansa kehidupan kota dengan ciri perekonomian jasa dan perdagangan sudah cukup berkembang di kecamatan ini. Perkembangan ini, ditunjang oleh fungsi kecamatan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Peran ekonomi Kota Agung cukup berarti terutama bagi kecamatan-kecamatan di wilayah pedalaman di bagian Barat Tanggamus, seperti Wonosobo, Bandung, Cukuh Balak, dll.

Peran sentral Kota Agung secara ekonomis didukung oleh sejumlah prasarana ekonomi seperti: terminal bus antar kota, pasar pusat serta BRI Unit Desa dan BPD. Pedagang perantara/penampung (mayoritas etnis Tionghoa) umumnya bermukim di kota ini, dan peran mereka cukup penting dalam perekonomian setempat. Selain itu, keberadaan pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga memberi sumbangan berarti dalam mendukung peran ekonomi Kota Agung. Pelabuhan tersebut berfungsi sebagai: 1) terminal angkutan umum, 2) pelabuhan pendaratan komoditas perkebunan dan perikanan dari sejumlah kecamatan tetangga serta pulau-pulau di Teluk Semangka. Untuk perikanan, Kota Agung dikenal sebagai salah satu pusat perikanan di Lampung Selatan. Orientasi pemasaran hasil perikanan ini adalah Jakarta. Hanya pada dua tahun terakhir ini aktivitas pelabuhan perikanan relatif berkurang karena merosotnya hasil tangkapan.

Karakter kehidupan masyarakat pesisir sangat menonjol di kecamatan ini. Sebab selain berada di kawasan pesisir, komunitas nelayan dan masyarakat yang mengandalkan matapencah-riannya pada sumber daya laut cukup dominan. Di samping itu areal persawahan dan ladang relatif kecil, yaitu sekitar 8.849 ha atau hanya 19.33% dari total luas wilayah³.

▪ Lokasi Pengamatan: Kasus Komunitas Nelayan

1. *Dusun Kapuran, Kelurahan Pasar Madang*

Pasar Madang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kota Agung yang berstatus swadaya. Luas wilayah kelurahan ini hanya 1 km persegi, dengan jumlah penduduk 7.121 jiwa (1.397 KK), terdiri dari laki-laki 3.162 jiwa dan perempuan 3.959 jiwa⁴.

Berdasarkan latar belakang etnis, penduduk kelurahan yang relatif kecil ini dapat disebut komunitas multi-etnik. Dalam komunitas itu, kelompok etnis Sunda (dalam istilah lokal disebut: *Jaseng*⁵) merupakan kelompok mayoritas, disusul kemudian dengan etnis Jawa, Bugis, dan dalam jumlah kecil terdapat kelompok etnis asli setempat (Lampung), Padang, Batak, Tionghoa).

³ Kecamatan Kota Agung dalam Angka 1998, BPS Propinsi Lampung

⁴ *Ibid.* dan Daftar Isian: Data Dasar Profil Desa/Kelurahan 1999

⁵ *Jaseng* (singkatan *Jawa-Serang*) adalah istilah populer setempat untuk menyebut komunitas etnis Sunda, khususnya wilayah Banten (Serang, Pandeglang) dan Cirebon. Kelompok lain yang cukup dominan adalah etnis Jawa yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian besar dari kelompok ini umumnya merupakan generasi yang lahir di Lampung, Sumatera, dan yang dikenal dengan sebutan *Pujakesuma* (*Putra Jawa kelahiran Sumatera*).

Dusun Kapuran merupakan salah satu dari dua dusun permukiman nelayan terbesar di Kelurahan Pasar Madang. Sama halnya dengan Kelurahan Pasar Madang, komunitas dusun ini kebanyakan adalah kaum pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Jawa dan Sulawesi. Para pendatang ini umumnya sudah tiga generasi bermukim di dusun ini.

Aksesibilitas ke dusun ini dapat dikatakan baik, karena berada di dalam wilayah kelurahan (di kecamatan ibukota kabupaten). Kondisi fisik lingkungan permukiman juga cukup baik. Walaupun di dominasi oleh rumah kayu dan semi-permanen, tetapi kondisi dusun cukup bersih untuk ukuran permukiman nelayan yang biasanya kumuh. Sebagian besar jalan permukiman sudah disemen dengan dana program PDM-DKE. Fasilitas umum (pasar, puskesmas, sekolah) yang dimanfaatkan oleh masyarakat dusun ini adalah fasilitas yang berada di kecamatan. Seluruh fasilitas tersebut mudah dijangkau karena dusun ini hanya berjarak sekitar 2 Km dari kota kecamatan.

Keberagaman latarbelakang etnis tidak menjadi penghalang terbentuknya komunitas sosial - di perantauan - yang berciri kedekatan hubungan antar kelompok. Salah satu indikasinya adalah cukup tingginya perkawinan antar etnis di dusun tersebut. Selain itu, perasaan senasib sepenanggungan sebagai sesama nelayan menjadi simpul sosial lain yang menonjol dalam komunitas multi-etnis Dusun Kapuran.

2. Desa Karang Buah, Kecamatan Cukuh Balak

Desa Karang Buah adalah sebuah desa di pulau Tabuan yang masuk dalam wilayah kecamatan Cukuh Balak⁶. Jumlah penduduk desa 1.029 jiwa (533 jiwa laki-laki dan 496 jiwa perempuan) terdiri dari 230 KK. Lebih dari 90% penduduk desa adalah etnis Lampung, sisanya etnis Sunda dan Jawa. Komoditas yang dihasilkan pulau seluas \pm 15.000 hektar ini adalah: 1) beras (tadah hujan); 2) perkebunan (kopi, cengkih, kelapa); dan 3) perikanan.

Beras dari pulau ini dihasilkan oleh para petani yang seluruhnya merupakan masyarakat pendatang asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mayoritas pendatang sebenarnya adalah para transmigran yang ditempatkan di Propinsi Lampung. Karena merasa tidak berkembang di lokasi transmigrasi di mana mereka ditempatkan, para transmigran asal Jawa tersebut kemudian merantau dan akhirnya menetap di Saung Balak (salah satu dari dua desa) di pulau tersebut. Sebagian kecil sisanya adalah para perantau yang juga dari Jawa. Bekas transmigran dan pendatang ini kemudian mengolah pertanian sawah tadah hujan. Hasil sawah cukup baik sehingga mereka dapat menjual surplus produksi ke kota kecamatan. Sementara itu, hasil perkebunan - kopi, kelapa dan cengkih - umumnya merupakan produksi masyarakat asli pulau (etnis Lampung) yang sudah mengusahakan perkebunan itu secara turun-temurun. Khusus untuk tanaman cengkih, selama lebih dari 10 tahun terakhir ini pulau Tabuan sudah tidak memproduksi cengkih karena masyarakat pulau telah menelantarkan tanaman tersebut. Penelantaran kebun cengkih itu berkaitan dengan pengalaman pahit warga pulau ketika harga cengkih merosot semasa BPPC beroperasi.

⁶ Desa Karang Buah, Kecamatan Cukuh Balak secara sengaja dikunjungi oleh Tim SMERU untuk memperoleh gambaran perbandingan antara dua komunitas nelayan (lihat uraian dalam Bab I, Metodologi).

Hasil perikanan dari pulau ini tidak terlalu besar, karena sektor perikanan hanya merupakan mata pencaharian sampingan warga pulau. Hal ini tampak dari tidak adanya nelayan atau pemilik perahu penangkap ikan besar di pulau ini. Seluruh responden di pulau ini menyatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan dan lobster mulai meningkat sejak hasil kebun cengkih tidak bisa diharapkan lagi.

Orientasi penjualan hasil pertanian dan perikanan dari dua desa di pulau ini adalah Kota Agung, baik untuk dipasarkan langsung di pasar atau dijual ke pedagang penampung. Hal ini dilakukan karena pasar serta pedagang perantara/penampung hanya ada di Kota Agung menjadi pusat perekonomian wilayah Barat Tanggamus.

Fasilitas sosial-ekonomi di pulau ini sangat minim. Jaringan listrik belum masuk ke pulau. Sumber listrik di Desa Karang Buah berasal dari generator sumbangan dari PT. Telkom. Generator tersebut dikelola oleh LKMD yang menyalurkan listrik ke sekitar 20 rumah. Masing-masing rumah ditarik iuran yang berkisar antara Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,-/bulan sesuai besarnya daya listrik yang digunakan. Sedangkan prasarana pendidikan yang ada hanya sebuah SD Inpres. Tidak terdapat pasar dan sarana kesehatan hanya Puskesmas Pembantu dengan satu bidan desa sebagai paramedis.

2.1.2. Kecamatan Talangpadang

Secara administratif Kecamatan Talangpadang terdiri dari 39 desa definitif. Karena perkembangan cukup pesat, maka wilayah kecamatan dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan. Pertama, kecamatan induk dengan ibukota Talangpadang (terdiri dari 28 desa), dan Kecamatan Pembantu Sumberrejo (terdiri dari 11 desa definitif).

Kota kecamatan berjarak sekitar 25 km dari ibukota kabupaten, dan sekitar 65 km dari ibukota propinsi. Sebagian besar wilayah Talangpadang yang luasnya 160,11 km persegi adalah dataran bergunung, hanya sebagian kecil merupakan dataran rendah. Ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 480 – 1500 Meter. Jumlah penduduk 118.072 jiwa (22.892 KK), terdiri dari 59.634 jiwa laki-laki dan 58.438 jiwa perempuan. Rata-rata jumlah jiwa per keluarga 5,2 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk 738 jiwa/km persegi.

Tumpuan perekonomian kecamatan adalah pertanian sawah dan perkebunan dengan total areal sawah 2.540,14 ha dan bukan sawah 13.470, 86 ha. Luas sawah berpengairan teknis hanya sekitar 40 ha, semuanya di Desa Kedaloman (desa komunitas etnis Lampung). Luas sawah berpengairan non-teknis adalah 2.162,14 ha., sedangkan areal perkebunan sekitar 52.099 ha. Perkebunan kopi memiliki areal paling luas, yaitu 50.230 ha disusul dengan areal perkebunan kelapa seluas 1.788 ha⁷.

Mata pencaharian mayoritas penduduk kecamatan adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Rincian dari jenis-jenis mata pencaharian masyarakat Talang Padang dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

⁷ Kecamatan Talangpadang Dalam Angka 1998, BPS Lampung

Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kec. Talang Padang

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian & Perkebunan	26.790
2.	Buruh tani	13.590
3.	Pengusaha	342
4.	Industri (genteng dan bata)	391
5.	Buruh industri	177
6.	Buruh bangunan	1.653
7.	Perdagangan	2.657
8.	Angkutan	576
9.	Pegawai Negeri/ABRI	1.440
10.	Pensiunan	531
11.	Lain-lain	69.573

Sumber: Kecamatan Talang Padang dalam Angka 1998, BPS Lampung

▪ **Lokasi Pengamatan: Komunitas Petani Sawah**

1. Desa Kalibening

Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, telah berstatus swasembada. Luas desa yang terkenal sebagai penghasil beras berkualitas ini 570 ha. Desa ini sekitar 5 km dari ibukota kecamatan atau sekitar 20 km dari kota kabupaten. Jumlah penduduk pada tahun 1998 tercatat 4.434 jiwa (830 KK), terdiri dari laki-laki 2.243 jiwa dan perempuan 2.191 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk 779 jiwa/km persegi.

Luas areal sawah 143 Ha (139 Ha berpengairan non-teknis dan 4 Ha tadah hujan), ladang 427 ha dan tegalan 319 ha. Areal sawah Kalibening merupakan areal terluas ke empat di Kecamatan Talang Padang. Lebih dari 90% penduduk desa mengandalkan pendapatan dari pertanian. Dari total jumlah tersebut jumlah petani asli warga Desa Kalibening yang memiliki lahan sawah dengan luas di atas 1 ha kurang dari 10%. Petani pemilik lahan kecil (0,5 – 1 ha) sekitar 20% dan 70% sisanya adalah petani tanpa lahan. Di kelompok petani tanpa lahan ini, sekitar 40% adalah petani penggarap/penyewa dan 60% lainnya buruh tani.

Ditinjau dari pemilikan lahan, informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber seperti Kecamatan, Kepala Desa, pengurus kelompok tani serta para petani, menyatakan bahwa lebih dari separuh lahan sawah dimiliki oleh petani/pengusaha yang bukan warga Desa Kalibening. “orang-orang luar” ini berasal baik dari desa/kecamatan tetangga seperti Pringsewu, bahkan juga Bandar Lampung. Dengan demikian warga asli Desa Kalibening pada saat pengamatan berlangsung hanya menguasai kurang dari separuh lahan pertanian yang ada, sedangkan sebagian besar dimiliki oleh sejumlah kecil elit ekonomi desa yang jumlahnya kurang dari 10 orang.

Mayoritas penduduk Desa Kalibening terdiri dari pendatang dari Jawa Barat (*Jaseng*) dan Jawa Tengah. Hanya ada beberapa keluarga etnis asli Lampung. Etnis asli umumnya tinggal di desa-desa yang terletak di sepanjang kanan-kiri jalur trans-Sumatra. Penduduk dari etnis asli sangat jarang tinggal di desa-desa pedalaman seperti Desa Kalibening

2.2. Struktur Sosial-ekonomi Desa

Ditinjau dari struktur sosial-ekonomi, masing-masing desa yang dikunjungi mempunyai beberapa persamaan kecenderungan. Pertama, gambaran struktur piramida sosial-ekonomi yang relatif mirip, yaitu kelompok strata bawah (> 70% dari total penduduk) secara ekonomi (sangat) rentan. Strata sosial-ekonomi menengah sekitar 20% serta strata teratas yang relatif mapan secara ekonomi di bawah 10%. Kedua, adanya hubungan patronase yang bersifat tradisional⁸ antara strata atas dan kedua strata lainnya. Ketiga, tidak terdapat tokoh informal yang berpengaruh dominan terhadap seluruh komunitas desa. Seorang tokoh informal dari latar belakang etnis tertentu umumnya hanya berpengaruh pada komunitas etnisnya saja. Tokoh agama seperti ustadz, meskipun cukup berpengaruh tetapi tidak terlampau menonjol. Keempat, individu yang dapat dianggap sebagai tokoh masyarakat dengan pengaruh sosial-ekonomi cukup penting adalah “orang-orang kaya desa” atau elit ekonomi desa. Kelompok kecil elit ini menguasai sejumlah sumber daya penting di desa, misalnya sebagai: pemilik sarana produksi (*juragan* kapal), pemilik sawah atau kebun yang luas, pemilik sarana produksi pertanian, pemilik penggilingan padi, dll. Karena itu mereka juga menjadi patron dari sejumlah warga desa. Di komunitas nelayan Dusun Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, tokoh ini diwakili oleh H. Payang (nama samaran, seorang *juragan* kapal) dan H. Kalam (nama samaran, pedagang pengumpul lobster besar). Sedangkan di Desa Kalibening terdapat nama-nama seperti H. Gozal, Kusman dan Lasman (semuanya nama samaran).

Ditinjau dari struktur perekonomian, secara umum di masing-masing desa pengamatan dapat ditemui 3 strata sosial-ekonomi. Pada komunitas nelayan, kelompok strata atas terdiri dari *juragan* (pemilik) kapal payang⁹ dan pursin¹⁰, pengusaha/pedagang pengumpul besar, PNS (yang berkedudukan sebagai kepala instansi) atau pegawai swasta setingkat manajer, pemilik toko besar dan sejumlah kecil kalangan wiraswasta yang berhasil dalam berusaha. Strata menengah terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan karyawan swasta atau disebut dengan istilah golongan berpenghasilan tetap (Golbertap), pengusaha pengolahan ikan, pedagang pengumpul kecil serta pemilik warung/kios. Sedangkan kelompok strata bawah terdiri dari nelayan pancing, nelayan katir (juga disebut nelayan

⁸ Yang dimaksud “hubungan patronase yang bersifat tradisional” di sini adalah hubungan sosial yang bersifat patron-klien yang telah berlangsung lama atau telah menjadi tradisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Umumnya, posisi sebagai patron di Kalibening berperan sebagai panutan secara sosial-ekonomi. Dalam pengertian tersebut, patron bukan hanya memberi nafkah hidup/pekerjaan, tetapi juga menjadi tempat untuk mencari pertolongan dan juga pendapat. Secara politik (tingkat lokal) patron juga cukup berpengaruh (misal dalam pemilihan Kades atau orientasi pada partai politik tertentu). Dalam hubungan patron-klien tersebut biasanya terjadi pertukaran barang, jasa, sarana atau apapun yang dianggap bernilai oleh komunitas sosial yang bersangkutan. Pihak patron biasanya memberikan/menyediakan uang tunai, barang, jasa atau sarana pada klien mereka. Sebaliknya, pihak klien - berdasarkan kesepakatan tertentu dengan patron - akan mengembalikan setiap pinjaman dengan “bunga” dalam berbagai bentuk, seperti: uang tunai, penjualan hasil panen ke patron dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar, penyediaan tenaga kasar, dll.

⁹ Kapal payang adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan jaring payang. Pengoperasian kapal ini didukung oleh sekitar 10 – 15 orang awak kapal, yang terdiri dari Juru Mudi, Juru Mesin, Penarik Jala dan penggiring ikan. Kapal ini biasanya melaut selama 1 atau 2 malam (tergantung daerah tangkapan dan perairan yang dituju).

¹⁰ Kapal pursin (*purseine*) adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan jaring pursin yang ukurannya lebih besar dari jaring payang. Pengoperasian kapal ini membutuhkan tenaga sampai 20 orang awak kapal, yang terdiri dari Juru mudi, Juru mesin, Penarik jala dan Penggiring ikan. Kapal ini biasanya melaut 3 hingga 5 malam. Karena ukuran kapal dan kapasitas mesinnya cukup besar, umumnya kapal ini beroperasi di perairan laut lepas seperti perairan Teluk Belimbing.

udang peci/jerbung) dan anak buah kapal (penggiring ikan, penarik jala; mereka ini sering disebut sebagai buruh nelayan)¹¹.

Pada komunitas petani lahan basah, yang termasuk dalam kelompok strata atas adalah pengusaha/pedagang penampung komoditas pertanian, pemilik penggilingan padi, pemilik sawah dengan luas di atas 10 ha, serta pemilik kios/warung penjual sarana produksi pertanian. Kelompok strata menengah terdiri dari sejumlah kecil PNS, pemilik sawah (2 – 5 hektar), petani penggarap (yang juga memiliki sawah 1 – 2 hektar) pedagang, pengusaha pembuatan genting dan bata, serta pemilik warung kelontong. Adapun kelompok strata terbawah terdiri dari: petani penggarap (tidak memiliki lahan) dan buruh tani (bukan penggarap dan tidak memiliki lahan).

Ketiga strata sosial-ekonomi tersebut pada dasarnya saling terkait dan saling membutuhkan antara satu kelompok dengan yang lainnya. Namun yang menonjol dalam hubungan itu bentuk hubungan patronase, di mana kelompok strata bawah banyak membutuhkan atau tergantung pada beragam bentuk bantuan dari dua kelompok lainnya.

Tabel 4 Struktur Sosial-Ekonomi Masyarakat di 3 Desa Amatan

Strata Sosial-ekonomi	Komunitas Nelayan (Pasar Madang & Karang Buah)	Komunitas Petani Sawah (Kalibening)
<p>1. Strata Atas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umumnya berperan sebagai elit ekonomi desa sekaligus Patron ekonomi dari kedua strata di bawahnya. Secara sosial-ekonomi dan politik keberadaan kelompok ini cukup berpengaruh bagi kelompok lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juragan/pemilik perahu ▪ Pengusaha penampung besar ▪ Pedagang/tengkulak ▪ Pengusaha pengolahan ikan ▪ Pemilik warung besar ▪ Golbertap (PNS-kepala/pimpinan instansi dan karyawan Swasta-setingkat manajer) ▪ Wiraswasta lain yang berhasil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengusaha desa/pemilik lahan luas dan pemilik penggilingan padi ▪ Pemilik lahan luas dan/atau pemilik warung (penjual sarana produksi pertanian) ▪ Pedagang pengumpul komoditas pertanian
<p>2. Strata Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian merupakan klien strata atas; ▪ Sebagian merupakan patron strata bawah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Golbertap (PNS dan karyawan swasta setingkat staf) ▪ Pedagang ikan/hasil laut ▪ Juru mudi ▪ Pemilik warung sedang & kecil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petani pemilik lahan kecil sekaligus penggarap/penyewa sawah milik pengusaha/orang kaya desa ▪ Pedagang pengumpul ▪ Pemilik warung kelontong ▪ Pengusaha pembuat bata
<p>3. Strata Bawah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klien dari kedua strata di atasnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nelayan udang peci/jerbung/nelayan perahu katir ▪ Nelayan pancing ▪ Buruh nelayan (penarik jaring, penggiring ikan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petani penggarap/penyewa (tidak memiliki sawah) ▪ Buruh tani (bukan penggarap/penyewa)

¹¹ Untuk menghindari salah penafsiran, dalam tulisan ini penggunaan istilah “nelayan miskin” atau “nelayan kecil” dalam laporan sebenarnya menunjuk pada ketiga kelompok nelayan tersebut.

2.3. Dinamika Masyarakat pada Masa Krisis

Sejumlah faktor seperti: i) faktor lingkungan (alam), ii) kebijakan pemerintah (misal: penetapan harga gabah, kebijaksanaan distribusi pupuk, pembentukan BPPC); serta iii) fluktuasi harga komoditas pertanian di pasar lokal dan internasional yang berkaitan dengan perkembangan nilai tukar dollar adalah variabel bebas yang berpengaruh secara berarti terhadap dinamika perekonomian perdesaan di masa krisis¹². Kombinasi dampak ketiga variabel bebas ini, bersama-sama dengan *kerismon* telah mengakibatkan tekanan ekonomi yang berat pada masyarakat di ketiga desa yang dikunjungi. Baik di komunitas nelayan atau petani pada umumnya menyampaikan keluhan tentang sulitnya memenuhi keperluan pokok sehari-hari serta kesulitan memenuhi modal usaha dan sarana produksi.

Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok selama masa krisis ekonomi, memang dirasakan menimbulkan kesulitan ekonomi. Tetapi, hingga akhir tahun 1998, kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari di masa krisis masih dapat “diimbangi” oleh meningkatnya harga jual komoditas yang dihasilkan nelayan dan petani. Situasi itu menyebabkan kondisi ekonomi nelayan dan petani sawah tidak banyak berubah pada awal masa krisis. Namun memasuki tahun 1999, bersamaan dengan tibanya masa *paceklik*¹³ dan adanya serangan hama *tungro*¹⁴, komunitas nelayan dan petani mulai merasakan dampak krisis yang sebenarnya. Masa *paceklik* bagi nelayan atau serangan hama padi bagi komunitas petani dapat diartikan pendapatan merosot tajam.

Para responden menyebutkan bahwa naiknya harga barang tidak berdampak terlalu buruk jika pendapatan para petani maupun nelayan berjalan normal. Permasalahan pokok yang mereka alami pada periode krisis ini adalah produktifitas untuk menghasilkan komoditas yang dapat dijual sangat rendah. Bagi para responden (dari komunitas nelayan atau pun petani), yang disebut masa krisis tepatnya mulai berlangsung sejak awal tahun 1999 hingga kini. Pada “masa krisis” versi mereka ini, responden mengakui bahwa tangkapan ikan maupun hasil panen merosot drastis akibat *paceklik* dan serangan *tungro*. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah jauh merosotnya tingkat pendapatan terutama bila dibanding masa dua tahun sebelumnya. Di pihak lain, rendahnya tingkat pendapatan ini diperburuk dengan harga barang-barang pokok dan sarana produksi yang tinggi pada masa *kerismon* ini.

¹² Lihat penjelasan dalam Bab IV Kredit Perdesaan di Masa Krisis

¹³ Lihat catatan kaki No. 27, Bab IV, halaman 31

¹⁴ Para responden dari kalangan petani, pada dasarnya juga tidak mengerti mengapa serangan *tungro* dapat berlangsung lama (4 musim tanam berturut-turut). Mereka hanya bisa mengemukakan beberapa kemungkinan penyebab serangan hama, seperti kesalahan dalam pengolahan tanah, pemilihan bibit yang tidak tepat atau kesalahan pemeliharaan. Dalam kaitan ini, para petani sesungguhnya sangat menyesalkan sikap dan kinerja PPL. Mereka menyatakan bahwa kinerja PPL selama ini dianggap telah turut menyebabkan berlarutnya masalah hama di Desa Kalibening. Menurut petani, mereka sudah berkali-kali menanyakan pada PPL tentang upaya mengatasi masalah serangan *tungro*, namun sikap dan tanggapan PPL sangat mengecewakan. Jawaban seperti: “Cabut saja tanaman padi yang sudah terkena *tungro*”, sering diterima petani ketika meminta saran bagaimana mengatasi serangan hama. Terdorong oleh rasa jengkel dan kesal karena sering mendapat jawaban seperti itu, sekitar Oktober 1999, para petani mendatangi Balai Penelitian Pertanian di Kecamatan Talang Padang agar melakukan tinjauan lapangan khusus untuk mengatasi serangan hama. Tapi permintaan ini juga tidak dipenuhi oleh Balai Penelitian tersebut.

2.3.1 Komunitas Nelayan: Dusun Kapuran dan Desa Karang Buah

Di komunitas nelayan seperti dusun Kapuran dan Karang Buah, keluhan dan kesulitan yang paling banyak disampaikan responden di masa krisis dan terpaan musim *paceklik* adalah sebagai berikut:

- 1) Peralatan yang rusak seperti mesin kapal dan jaring belum diperbaiki atau tidak diganti dengan yang baru karena ketiadaan biaya dan akibat melonjaknya harga-harga barang sarana produksi (yang umumnya masih merupakan barang-barang impor);
- 2) modal operasional (modal melaut) makin sulit dipenuhi, selain karena harga barang-barang pokok meningkat, juga diakibatkan oleh semakin rendahnya tingkat pendapatan nelayan;
- 3) pendapatan nelayan jauh berkurang karena hasil tangkapan merosot akibat *paceklik* yang pada tahun 2000 ini telah memasuki tahun kedua;
- 4) kebutuhan pokok sehari-hari semakin sulit dipenuhi akibat naiknya harga barang kebutuhan pokok serta merosotnya tingkat pendapatan;
- 5) frekuensi kegiatan sosial seperti arisan di kalangan nelayan miskin berkurang bahkan banyak yang berhenti karena ketiadaan uang tunai untuk membayar iuran arisan;
- 6) upaya anggota keluarga (yang telah mampu bekerja) untuk mencari penghasilan dalam rangka meningkatkan pendapatan semakin bertambah
- 7) frekuensi berhutang untuk memenuhi beragam kebutuhan rumah tangga meningkat

(Gejala seperti pada *point* (4) hingga (7) terutama dialami oleh kalangan nelayan miskin).

Seperti telah disinggung di atas, kondisi perekonomian yang sulit yang dialami komunitas nelayan tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal yaitu dampak krisis. Tekanan ekonomi yang berat terjadi karena adanya kombinasi sejumlah faktor. Dari pernyataan responden terlihat bahwa sesungguhnya mereka memahami kondisi memburuknya perekonomian mereka. Para responden menyatakan bahwa ketika masyarakat di banyak daerah di Indonesia mengalami *krismon*, nelayan di Kota Agung justru mendapat keuntungan ekonomi dari *krismon*. Tetapi, di tahun 2000 ini ketika kondisi perekonomian di banyak daerah berangsur membaik, mereka mengalami situasi sebaliknya. Artinya, justru sejak awal tahun 1999 ini, perekonomian komunitas nelayan di Kota Agung sedang mengalami masa krisis. Selanjutnya mereka seperti sepakat untuk menyatakan bahwa musim *paceklik* panjang kali ini adalah faktor penyebab penting, sedangkan krisis ekonomi merupakan faktor yang memperburuk kondisi mereka.

Upaya yang dilakukan oleh komunitas nelayan - di ketiga strata ekonomi - untuk bisa keluar dari tekanan ekonomi cukup beragam. Kalangan menengah dan atas - yang *notabene* memiliki aksesibilitas baik pada skema kredit formal - mencoba untuk memperoleh kredit dari BRI (*libat* kotak 1 *Haji Payang*). Golbertap juga cenderung memilih solusi yang sama atau memanfaatkan pinjaman yang mungkin dapat diperoleh dari kelompok arisan, koperasi atau anggota keluarga yang mampu. Situasi yang paling sulit adalah yang dialami kalangan nelayan miskin.

Seperti dijelaskan Rohana (nama samaran), responden pemilik warung di Dusun Kapuran, akhir-akhir ini frekuensi berhutang dari sejumlah istri nelayan meningkat. Demikian pula orang yang datang dengan keperluan mencari pinjaman. Yang terakhir ini bahkan tidak sedikit yang menawarkan barang-barang berharga (khususnya perhiasan emas) sebagai jaminan. Gejala ini jarang terjadi sebelumnya. Sementara di kalangan nelayan kecil, anak buah kapal dan nelayan udang peci, semakin sering meminjam pada

juragan dan warung-warung langganan mereka. Responden nelayan dengan lesu juga mengemukakan bahwa hasil kerja melaut akhir-akhir ini hanya bisa membawa pulang "*ikan makan*"¹⁵. Dalam gambaran situasi ekonomi yang sulit inilah, Rohana menambahkan bahwa kini, banyak kegiatan arisan di kalangan nelayan miskin tidak berlanjut. Alasannya adalah selain ketiadaan uang tunai, di kalangan peserta juga ada keraguan terhadap kelanjutan arisan itu sendiri. Artinya, untuk saat ini, ancaman bahwa kegiatan arisan berhenti di tengah jalan sangat besar.

Sementara itu, di Desa Karang Buah, istri Kepala Desa dan para perempuan umumnya di pulau Tabuan, sudah setahun terakhir ini membuat tikar - rata-rata 2 lembar sehari - untuk dijual dengan harga Rp. 2.500,-/lembar di pasar Kota Agung. Sebetulnya pembuatan tikar untuk menjemur cengkeh merupakan kerajinan tradisonal. Perbedaannya, sebelum krisis mereka membuat tikar untuk digunakan sendiri, tapi sekarang mereka membuat tikar untuk dijual untuk sebagai upaya mencari penghasilan tambahan. Sedangkan kalangan pria cenderung untuk mencari tambahan penghasilan sebagai nelayan ikan atau lobster untuk dijual ke Kota Agung. Perlu diketahui bahwa kegiatan nelayan bukanlah pekerjaan utama kalangan pria Desa Karang Buah. Pada masa lalu, sumber penghasilan utama mereka adalah hasil kebun (khususnya cengkeh, selain kopi dan kelapa). Karena itu kegiatan menangkap ikan hanyalah kegiatan sampingan yang dilakukan hanya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Namun, sejak harga cengkeh jatuh semasa BPPC beroperasi, kegiatan pemanfaatan sumber daya laut menjadi alternatif sumber pendapatan yang penting. Dampak *krismom* dalam kaitan ini sesungguhnya bersifat memperbesar tekanan ekonomi pada masyarakat atau memperburuk kondisi "krisis ekonomi" yang sudah dialami masyarakat sejak jatuhnya harga cengkeh. Keadaan ini, baik bersifat langsung atau tidak, telah mendorong semakin banyak penduduk desa yang berusaha dalam kegiatan pemanfaatan hasil laut untuk dijual ke Kota Agung.

¹⁵ "Ikan makan" adalah istilah setempat yang dapat diartikan sebagai "ikan untuk lauk makan". Pada saat tangkapan ikan cukup baik, biasanya awak kapal sering memberi satu atau dua ekor ikan kepada orang-orang tua, kaum ibu dan anak-anak nelayan yang meminta ikan di pelabuhan. Tujuannya adalah sekedar membantu meringankan biaya belanja kebutuhan lauk makan.

Kotak 1
Haji Payang

Haji Payang, nama samaran, adalah pendatang asal Banten yang telah menetap di Pasar Madang sejak tahun 1974. Ayah dari enam orang anak ini mengawali usahanya sebagai pedagang ikan. Ia menekuni usaha itu sekitar tiga tahun (dari 1974 sampai 1977). Dari keuntungan usahanya, pada tahun 1977 ia mampu membeli sebuah kapal payang bekas dengan mesin 33 PK. Kapal itu dibeli dari saudaranya di Labuan (Banten) dengan harga Rp. 2.500.000,-. Dengan kapal tersebut, hanya dalam tempo dua bulan Haji Payang mampu membeli satu kapal payang baru. Dengan adanya tambahan kapal payang itu semakin besar pula penghasilan yang dapat diperoleh.

Ditopang dengan penghasilan yang semakin besar itulah, pada tahun 1988 Haji Payang memutuskan untuk membuat kapal payang sendiri dengan mendatangkan ahli pembuat kapal dari Cirebon. Sejak itu, ia mulai menambah armadanya dengan kapal buatannya sendiri yang dilengkapi dengan mesin berkekuatan 33 PK. Dari usahanya yang terus berkembang itulah pada tahun 1998 jumlah kapal payang yang dimilikinya mencapai 10 unit dan satu unit kapal purnsin (*purseine*). Saat ini, ia dikenal sebagai juragan kapal terkaya di Pasar Madang.

Menurut Haji Payang dua tahun terakhir ini merupakan masa *paceklik* usahanya. Hasil tangkapan ikan pada kurun tersebut anjlog. Bagaimanapun, kondisi *paceklik* telah memperburuk situasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Dampak yang sangat dirasakan oleh Haji Payang sebagai juragan kapal adalah ia tidak bisa memperbaiki beberapa mesin kapal yang rusak karena biaya perbaikan atau harga komponen mesin di masa krisis sangat mahal. Saat ini ada 3 kapalnya yang rusak dan belum dapat diperbaiki. Kondisi ini diperburuk dengan keperluan mengganti jaring yang rusak dan belum dapat diperbaiki karena harga jaring juga melonjak tajam.

Biaya operasional melaut saat ini juga meningkat tajam, untuk 1 kapal payang sekitar Rp. 100 – 150 ribu, sementara untuk kapal *purseine* hingga Rp. 350 ribu. Dengan demikian, pengusaha ikan ini harus mengeluarkan sedikitnya Rp. 1 - 1,5 juta setiap kali 7 kapal payang dan 1 unit *purseine*-nya melaut. Masalahnya, pada musim *paceklik* ini biaya operasional itu tidak pernah tertutup oleh hasil tangkapan. Dengan kata lain hasil tangkapan selama hampir 2 tahun terakhir ini selalu merugi. Kondisi ini memberikan tekanan ekonomi yang berat pada juragan kapal ini. Salah satu cermin dari beratnya tekanan ekonomi adalah Haji Payang menunggak angsuran Kupedes BRI selama 6 bulan. Bagi pengusaha perikanan terkemuka di Pasar Madang ini menunggak angsuran kredit BRI sungguh dirasakan mencoreng nama baiknya. Haji Payang sudah menjadi nasabah BRI lebih dari 15 tahun. Kredit yang pernah diambil mulai dari Rp. 500 ribu (1983), hingga yang terakhir sebesar Rp. 15 juta (1998).

Harapan Haji Payang pada masa krisis ini adalah pinjaman kredit sekitar Rp. 30 – 35 juta. Jika memperoleh kredit sebesar itu selain untuk memperbaiki mesin dan jaring yang rusak juga digunakan untuk menambah biaya operasional. Di samping itu sebagian dari pinjaman juga digunakan untuk persediaan uang tunai untuk keperluan para awak kapalnya yang sangat membutuhkan pinjaman (hutang) pada masa *paceklik*. Hal yang terakhir ini cukup membebani pikiran Haji Payang. Dalam penuturannya, akhir-akhir ini awak kapalnya semakin sering meminjam/berhutang untuk keperluan hidup sehari-hari.

Dengan keadaan seperti di atas, sebenarnya Haji Payang ingin mengajukan kredit lagi ke BRI. Tapi karena kredit yang ada belum lunas dan menunggak, Haji Payang memutuskan untuk mencari kredit dari bank yang lain. Usaha yang pernah dicoba adalah dengan mengajukan kredit ke Bank Danamon, tapi ditolak karena Bank Danamon tidak mengeluarkan skema khusus untuk nelayan. Selain ke Bank Danamon Haji Payang juga pernah mengajukan kredit ke BPD sebesar Rp 15 juta atas nama ayah mertuanya, tetapi yang direalisasikan hanya Rp. 2 juta, sehingga dikembalikan lagi ke BPD. Keadaan sekarang ini dijadikan suatu pengalaman yang sangat berharga, dan ia berharap adanya kemudahan untuk mendapatkan kredit baru dengan proses pencairan yang cepat dengan bunga yang rendah.

2.3.2. Komunitas Petani Sawah: Desa Kalibening

Di kalangan responden komunitas petani di Desa Kalibening, keluhan yang paling banyak disampaikan pada masa krisis ini adalah:

- 1) Upaya mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan biaya tanam semakin sulit karena semakin berakumulasinya hutang biaya tanam dari musim tanam-musim tanam sebelumnya.
- 2) Pendapatan petani jauh berkurang akibat kegagalan panen secara berurutan
- 3) kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena ketiadaan uang tunai dan semakin menumpuknya jumlah hutang.
- 4) Frekuensi kegiatan sosial seperti arisan berkurang, bahkan kegiatan pengajian untuk sementara waktu tidak lagi diselenggarakan
- 5) Upaya anggota keluarga (yang telah mampu bekerja) untuk mencari penghasilan tambahan meningkat dan diikuti dengan bertambahnya jumlah waktu (jam kerja) yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan tersebut.
- 6) Frekuensi berhutang meningkat untuk memenuhi beragam kebutuhan rumah tangga dari kebutuhan pendidikan anak, kesehatan atau pembelian baju baru pada saat lebaran.

Agak berbeda jika dibandingkan dengan komunitas nelayan, di komunitas petani Desa Kalibening, kalangan petani strata atas atau para elit ekonomi desa tidak merasakan dampak berarti dari krisis saat ini. Saat pengamatan berlangsung, mereka tengah menikmati hasil panen lada (walaupun selama 2 bulan terakhir - terhitung sejak saat pengamatan - harga lada sedikit turun). Namun bagi petani kalangan menengah dan bawah situasinya tidak berbeda dengan komunitas nelayan.

Tekanan ekonomi yang begitu berat yang dialami oleh petani miskin tampak dari tidak diadakannya lagi pengajian rutin mingguan. Gejala ini cukup mengherankan untuk terjadi di komunitas petani Desa Kalibening yang menghargai nilai-nilai religius. Demikian pula sejumlah kegiatan arisan mengalami penyusutan peserta bahkan, seperti diakui, tidak sedikit yang berhenti.

Dalam penjelasan responden dari kalangan istri petani miskin - dalam suatu diskusi kelompok yang hangat - terungkap bahwa kegiatan pengajian sementara waktu berhenti karena tidak ada peserta pengajian yang hadir. Salah satu alasan mereka dapat disimak berikut ini:

“Bagaimana ya pak... lha wong kita sampai di rumah saja sudah malam. Kalau lagi musim panen lada (saat pengamatan dilakukan perkebunan lada sedang panen) seperti ini, ya kita semua ini pada pergi ikut panen. Ya namanya orang tidak mampu pak, kita kan harus cari tambahan uang. Lha ini saja kita baru saja sampai di rumah ..ee.. dikasih tahu Bu Kades untuk datang ke sini (datang ke Diskusi Kelompok). Kalo pengajian itu sekarang tidak ada itu kan karena kita cape. Ya gimana ya pak, pagi-pagi sekali kita bantu bapaknya (suaminya) kerja di sawah. Terus mburuh (menjadi buruh di sawah orang lain). Itu lho pak, kerja ngoyos¹⁶. Lalu pulang

¹⁶ “Ngoyos” artinya menyangi rumput di sawah. Ngoyos adalah lapangan kerja di sawah yang bisa dimanfaatkan perempuan. Di Desa Kalibening, upah ngoyos untuk satu kotak sawah Rp. 2.500,- Dalam sehari seseorang dapat mengerjakan 2 kotak, artinya mendapat upah Rp. 5.000,-

untuk masak. Kalo ada waktu kita ngored¹⁷. Lha sorenya kita berangkat lagi untuk mburuh panen lada. Ya biasanya ya seperti ini. Sampe di rumah sudah malam. Kebunnya kan jauh pak. Sampe di rumah ya capek pak. Kalo harus ikut pengajian lagi ya ndak kuat pak”

Dari penjelasan responden di atas, tampak jelas bahwa tekanan ekonomi saat ini telah membuat hampir seluruh waktu suami dan istri dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Kalaupun belum cukup, solusinya adalah berhutang pada warung atau tetangga. Namun jika tetangga atau kaum kerabat (yang *notabene* nasibnya tidak jauh berbeda) tidak bisa memberi pinjaman, alternatif terakhir adalah menemui rentenir.

Harus diakui bahwa sejumlah keluhan yang disampaikan responden petani di atas merupakan gejala klasik atau “bukan hal baru”. Gejala tersebut sangat sering dijumpai di komunitas petani miskin. Responden dari kalangan petani miskin memang mengakui bahwa sebelum *krismon* pada dasarnya mereka telah terbelit oleh masalah kemiskinan. Gejala seperti i) kesulitan modal untuk memenuhi kebutuhan biaya tanam; ii) berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; serta iii) usaha mencari penghasilan tambahan pada dasarnya juga telah berlangsung jauh sebelum masa krisis. Namun sejak tahun 1999, dengan adanya kegagalan panen secara berturut-turut yang dikombinasi dengan dampak krisis telah menghadapkan petani miskin pada situasi yang lebih berat lagi. Dalam ungkapan mereka (petani miskin) sendiri, kondisi beratnya tekanan ekonomi saat ini dilukiskan sebagai: “*Tambah nemen, Pak!*” (makin parah).

Dalam realita sehari-hari, ungkapan “*Tambah nemen*” itu bisa disimak dari beberapa cuplikan hasil wawancara berikut.

“Lebaran sebelumnya (Idul Fitri tahun 1998), saya sekeluarga masih bisa beli baju baru yang harganya ya.. sekitar 30 ribuan. Waktu itu kan dengan menjual satu kuintal gabah sekeluarga bisa membeli baju baru. Kita (maksudnya orangtua/suami-istri) masih bisa beli setidaknya baju baru lengkap. Waktu lebaran tahun ini ya.. apa adanya Pak. Kita orang tua lebih mengutamakan baju untuk anak-anak. Itu pun bukan yang baik ya Pak. Kita beli baju yang murab-murab saja Pak. Yang penting anak-anak senang, Lebaran bisa pake baju baru”.

III. KREDIT PERDESAAN DAN PILIHAN MASYARAKAT

3.1. Skema Kredit Perdesaan

Dari pengamatan terhadap tiga desa yang dikunjungi, Tim SMERU menjumpai beberapa kecenderungan yang mempengaruhi aksesibilitas masyarakat desa terhadap skema kredit.

- 1) **Keterbatasan Lembaga Keuangan Formal (Bank, Koperasi).** Ditinjau dari sisi *supply*, keterbatasan jumlah lembaga keuangan formal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian setempat yang belum begitu berkembang. Kondisi tersebut mempengaruhi kebijakan pihak perbankan untuk membatasi skala dan kapasitas

¹⁷ “*Ngored*” artinya menanam keladi di ladang sekitar rumah agar mempunyai makanan tambahan di samping nasi. Akhir-akhir ini kegiatan “*ngored*” semakin sering dilakukan karena mereka tidak mampu membeli beras.

operasional mereka. Pembatasan ini dapat diartikan sebagai: pertama, pembatasan kelembagaan; kedua, pembatasan besarnya kredit yang dapat disalurkan melalui suatu unit. Pembatasan yang pertama tampak dari kebijaksanaan BRI untuk mempertahankan status Unit Desa untuk Kota Agung (tidak ditingkatkan menjadi Cabang). Kecenderungan ini bukan hanya berlaku bagi BRI tetapi juga bagi BPD dan bank swasta nasional seperti Bank Danamon. Bahkan Bank Danamon sama sekali tidak memiliki kantor perwakilan di Kota Agung. Sedangkan pembatasan skala kredit tampak dari ketentuan bahwa untuk kredit di atas Rp. 30 juta calon peminjam dari Kota Agung harus mengajukan kredit di Cabang BRI Pringsewu.

- 2) **Prinsip *prudential banking* dan Keterbatasan Jangkauan Kredit Formal.** Seperti diakui oleh UDO (*Unit Desa Officer*) BRI Cabang Pringsewu dan Kepala BRI Unit Kota Agung, penerapan prinsip ini telah mempengaruhi kinerja penyaluran kredit. Dalam penerapan prinsip itu aspek kolateral merupakan prasyarat utama yang harus dapat dipenuhi calon nasabah (di samping usaha nasabah yang prospektif yang dapat menjamin pembayaran angsuran tepat waktu). Secara langsung atau pun tidak, ketentuan ini telah mengakibatkan terbatasnya jumlah nasabah yang mampu memenuhi persyaratan standar. Karena pemberian kredit yang sangat selektif ini, maka hanya golongan tertentu dalam masyarakat yang dapat mengakses KUPeDES. Dari tiga desa yang diamati, hanya sekitar 10% masyarakat Kelurahan Pasar Madang yang mampu mengakses KUPeDES. Hal ini mungkin terjadi karena kebanyakan PNS atau golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) serta pengusaha/pedagang banyak yang bermukim di kelurahan tersebut. Sementara di Desa Karang Buah dan Kalibening persentase warga desa yang mampu mengakses KUPeDES kurang dari 5%. Di sisi lain fenomena ini menjelaskan bahwa skema kredit seperti KUPeDES sebetulnya sejak awal “tidak didisain untuk menjangkau” atau tidak terjangkau oleh lapisan terbawah masyarakat desa yang umumnya tidak mampu memenuhi persyaratan dasar.

Gejala seperti di atas tercermin dalam perkembangan jumlah nasabah dari tahun ke tahun yang cenderung kecil atau tidak menunjukkan persentase peningkatan yang berarti. Menurut sumber di BRI Unit Desa, jumlah nasabah bertambah sekitar 2 – 3 peminjam baru per kuartal. Dari jumlah pertambahan nasabah yang kecil itu, yang terbanyak berasal dari Golbertap. Ditinjau dari perkembangan nilai *outstanding* kredit, Pimpinan BRI Unit Desa mengatakan bahwa pada tahun 1997 - 1998 peningkatannya ternyata cukup besar. Namun dari tahun 1998 hingga saat pengamatan berlangsung kecenderungannya tetap. Jika dilihat dari kurva *outstanding* maka bentuknya mendatar. Gejala ini, seperti diakui oleh sumber yang sama, menunjukkan bahwa pertambahan jumlah nasabah bukanlah faktor utama dalam peningkatan *outstanding* kredit. Peningkatan itu lebih banyak disebabkan oleh semakin besarnya nilai pinjaman baru yang diberikan pada sejumlah nasabah lama.

- 3) **Rendahnya Peran Koperasi.** Faktor lain yang juga mempengaruhi ketersediaan (*availability*) skema kredit adalah karena peran koperasi kurang optimal. Dari lima koperasi yang dikunjungi Tim SMERU, hanya satu koperasi, yaitu KOPPAS Kota Agung yang beroperasi dengan baik. Unit usaha simpan-pinjam koperasi ini cukup berkembang dengan jumlah anggota mencapai 130 orang. KUD Mina Teluk Semangka, misalnya, hanya memusatkan usahanya dalam pengelolaan TPI. Karena masalah *mismanagement* dan banyaknya tunggakan, KUD Mina menghentikan unit usaha simpan-pinjam. Sementara tiga KUD lainnya tidak lagi beroperasi dengan

normal karena kekurangan dana. Unit usaha simpan pinjam ketiga KUD tersebut rata-rata sudah berhenti setahun terakhir (skema kredit terakhir yang disalurkan adalah KUT MT 1998/1999).

- 4) **Tingkat Perekonomian Subsisten.** Karakter dasar dalam perekonomian komunitas nelayan maupun petani lahan basah, masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat perekonomian subsistensi. Di Dusun Kapuran, Kelurahan Pasar Madang dan Desa Karang Buah, komunitas nelayan didominasi oleh buruh nelayan/nelayan kecil. Sementara di komunitas petani lahan basah didominasi oleh buruh tani dan penggarap yang tidak memiliki tanah atau hanya mempunyai tanah yang sangat kecil. Dengan kondisi ini dapat dipahami jika kemampuan mengakses skema kredit formal kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi ini juga rendah. Kendala utama yang ditemui adalah: i) ketidak-mampuan memenuhi persyaratan kolateral (khususnya sertifikat rumah atau tanah, atau jaminan berharga lain); ii) ketidakmampuan menjamin pembayaran cicilan karena penghasilan tidak pasti (pada kelompok nelayan), serta penghasilan musiman yang rentan terhadap serangan penyakit/hama (pada kelompok petani); iii) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin desa sehingga enggan berhubungan dengan lembaga keuangan formal; dan iv) informasi dan sosialisasi tentang skema kredit formal bagi masyarakat lapis bawah masih kurang. Hal yang terakhir ini timbul karena lembaga keuangan formal yang ada hanya menyediakan skema kredit untuk golongan yang mampu memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan. Selain itu, staf bank (misal BRI Unit Desa) cenderung membatasi hubungan perkreditan hanya dengan calon nasabah dari golongan ekonomi mapan.

3.1.1. Skema Kredit Formal

KUPEDES BRI Unit Desa

Skema kredit formal yang relatif paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di ketiga desa yang diamati adalah KUPEDES dari BRI. Dalam persentase yang relatif kecil, masyarakat juga menggunakan kredit formal dari BPD atau Cabang Pembantu Bank Danamon (khususnya untuk masyarakat Kecamatan Talang Padang). Namun demikian, seperti telah diuraikan sebelumnya, skema kredit formal umumnya hanya dapat diakses oleh masyarakat dari golongan menengah ke atas. Kesulitan utama yang paling dirasakan adalah menyangkut persyaratan kolateral karena secara umum mayoritas masyarakat - baik nelayan maupun petani - belum mampu menyediakan persyaratan tersebut.

Aksesibilitas golongan menengah ke atas pada kredit formal cenderung lebih besar karena selain mampu memenuhi persyaratan kolateral, pihak BRI juga percaya pada prospek usaha yang dilakukan pengusaha-pengusaha tersebut atau jaminan pembayaran cicilan dari nasabah yang berkategori golbertap. Hampir semua pengusaha menengah ke atas di Kelurahan Pasar Madang dan Desa Kalibening pernah dan sedang menjadi nasabah KUPEDES BRI. Besarnya nilai kredit yang diambil tergantung dari besarnya usaha yang sedang dijalankan. Menurut catatan terakhir besarnya kisaran kredit yang disalurkan melalui KUPEDES adalah: Rp. 1,5 juta sampai Rp. 15 juta, dengan bunga berkisar antara 1,5% - 2%/bulan. Menurut sumber di BRI Unit Desa, besaran kredit KUPEDES cenderung meningkat. Dua tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi nasabah yang mengajukan kredit di bawah Rp. 1 juta.

Dari 4 (empat) sektor kredit yang dilayani KUPeDES (Perdagangan, Perindustrian, Pertanian serta Jasa dan Usaha), sektor pertanian merupakan sektor yang mendapat alokasi kreditnya paling besar. Sektor pertanian merealisasi pemberian kredit lebih dari 50% *outstanding* KUPeDES. Sementara itu di dalam sektor pertanian sendiri, terdapat keseimbangan antara realisasi kredit untuk bidang perikanan dan pertanian.

Berkenaan dengan kebijakan BRI untuk menerapkan bunga pinjaman komersial dalam skema KUPeDES, pihak BRI Unit menjelaskan bahwa ketentuan bunga komersial di satu pihak merupakan keharusan. Artinya, dengan ketentuan itu, para nasabah “dipaksa” untuk bersungguh-sungguh menggunakan kredit secara optimal, terutama bagi mereka yang menggunakan KUPeDES sebagai kredit investasi atau untuk modal usaha produktif. Pemikiran dasar penetapan bunga komersial adalah agar masyarakat memiliki tanggung jawab pemanfaatan kredit. Dikhawatirkan jika KUPeDES tidak menerapkan ketentuan bunga komersial maka besar kemungkinan skema kredit tersebut dimanfaatkan untuk keperluan yang semata-mata konsumtif. Secara tidak langsung hal ini adalah dikatakan sebagai upaya untuk mendidik masyarakat. Jadi masyarakat tidak dibiarkan menjadi manja dengan bunga kredit lunak dan sangat lunak, lanjut sumber di BRI.

Dengan demikian Pemerintah tidak perlu terlalu banyak memberikan subsidi bunga yang pada akhirnya justru akan memberikan beban pada masyarakat karena tidak mampu mengembalikan kredit bersubsidi. Banyak kebijaksanaan dalam bentuk program kredit khusus seperti KUT yang akhirnya berujung pada kegagalan. Kredit tidak terbayar karena masyarakat sasaran tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kredit tersebut. Untuk lebih mengembangkan skema yang ada, BRI mengambil langkah-langkah pendekatan terhadap masyarakat untuk lebih intensif lagi melakukan sosialisasi program.

Unit Simpan-Pinjam KOPPAS “Tandikat”

KOPPAS (Koperasi Pedagang Pasar) Tandikat yang dibentuk pada tahun 1971, adalah sebuah contoh keberhasilan pengembangan usaha. Keberhasilan itu dapat dilihat pada bisnis Wartel yang dikelola koperasi ini. Wartel koperasi ini merupakan wartel pertama dan terbesar di Kota Agung. Di samping wartel, unit usaha simpan-pinjamnya juga diakui oleh masyarakat sebagai unit yang terbaik. Di bawah ketua koperasi yang baru, koperasi ini berkembang pesat. Munculnya Wartel dan perkembangan unit simpan-pinjam adalah hasil kejelian melihat peluang usaha dari tokoh masyarakat Sumatra Barat ini - saat ini ia menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Sumbar di Kota Agung.

Unit simpan-pinjam koperasi ini mulai berkembang pesat sekitar tahun 1994 ketika usaha wartel mampu mensubsidi modal untuk mengaktifkan kembali unit simpan-pinjam koperasi¹⁸. Kini anggota koperasi sudah mencapai 130 orang semuanya terdiri dari

¹⁸ Walaupun sebelum tahun 1994 kegiatan Unit Simpan-Pinjam KOPPAS Tandikat dapat berjalan tetapi kondisinya tidak begitu baik (tidak berkembang). Hal ini, berdasarkan hasil wawancara, karena ketiadaan modal yang memadai yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut. Di samping itu juga diakui bahwa harga komoditas pertanian dan perkebunan tidak begitu baik. Kondisi ini dapat dikatakan agak berubah ketika pada masa krisis harga komoditas perkebunan (khususnya kakao, lada dan kopi) melonjak. Lonjakan harga komoditas tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan banyak pedagang pasar membutuhkan modal untuk keperluan perdagangan komoditas perkebunan. Ketua KOPPAS mengakui bahwa perubahan harga komoditas perkebunan dapat dijadikan sebagai indikator kegiatan perdagangan di Kota Agung, serta secara tidak langsung turut mempengaruhi kegiatan unit simpan-pinjam koperasinya.

pedagang pasar. Sedangkan plafon nilai pinjaman yang dapat diberikan oleh koperasi telah mencapai Rp. 5 juta dan total *outstanding* pinjaman mencapai Rp. 500 juta.

Persyaratan utama untuk meminjam adalah syarat keanggotaan serta dapat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran simpanan wajib dan pokok yang ditetapkan. Seorang anggota baru dapat mengajukan pinjaman setelah minimal 2 (dua) bulan terdaftar sebagai anggota. Di samping persyaratan itu juga ditetapkan persyaratan lain, yaitu kelayakan kondisi usaha¹⁹. Jika kriteria ini dapat dipenuhi, maka anggota baru tersebut dapat menerima pinjaman pertama sebesar Rp. 500.000,-. Jangka waktu pinjaman adalah 10 minggu dengan kewajiban angsuran mingguan Rp. 50.500,-/minggu. Dengan demikian tingkat bunga pinjaman sekitar 2%/bulan.

Sanksi tunggakan yang berlaku adalah sanksi yang disetujui bersama oleh seluruh anggota koperasi, yaitu: jika peminjam menunggak selama dua minggu, maka angsuran setelah menunggak akan dikenakan bunga 5%/bulan hingga angsuran lunas. Walaupun sanksi ini cukup berat, namun kenyataannya unit simpan-pinjam ini berjalan dengan baik. Para anggota pun terus mengajukan permintaan pinjaman baru. Pada masa krisis ini diakui bahwa jumlah tunggakan meningkat dan persentase tunggakan tahun berjalan ini sekitar 30%.

60% pinjaman yang diberikan digunakan untuk keperluan produktif (modal usaha) dan sekitar 40% untuk keperluan konsumtif. Untuk keperluan produktif, pinjaman koperasi telah dimanfaatkan oleh pengusaha foto studio, bengkel, toko kelontong, toko elektronik, pakaian jadi (*garment*), dan yang terbanyak untuk perdagangan hasil bumi.

KOPPAS Tandikat yang dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) terakhir mampu membagikan SHU sebesar Rp. 36 juta²⁰ pada anggotanya ini merencanakan akan melayani simpan-pinjam pada non-anggota. Tetapi sayang rencana tersebut hingga sekarang belum terealisasi karena dananya belum tersedia.

¹⁹ Persyaratan kelayakan usaha ini dianggap sangat penting karena KOPPAS harus mendapatkan jaminan bahwa anggota yang meminjam memiliki suatu usaha (yang sedang berjalan) dan perlu mempertimbangkan apakah kondisi usaha tersebut sehat dan prospektif. Pertimbangan ini dibutuhkan sebagai jaminan bahwa anggota yang meminjam dapat menjamin kelancaran pembayaran angsuran.

²⁰ Diakui oleh Ketua KOPPAS bahwa keuntungan terbesar yang diperoleh koperasi berasal dari usaha wartel dan disusul oleh keuntungan dari unit simpan-pinjam. Pembagian SHU koperasi (sebesar Rp. 36 juta) dengan demikian juga bisa dianggap sebagai: 1) pembagian keuntungan usaha koperasi, dan 2) pembagian keuntungan pada para anggota koperasi yang telah memanfaatkan unit simpan-pinjam.

Kotak 2

Hadi, Pengusaha Ikan Asin dan Pindang

Pada tahun 1982 Hadi (nama samaran) meninggalkan Demak untuk merantau dan mengadu nasib di tanah seberang. Tujuan perantauannya adalah Desa Gisting. Desa Gisting adalah daerah pertanian sawah terbesar di wilayah Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus yang juga dikenal sebagai daerah perkebunan kopi dan penghasil ikan tawar. Setelah lima tahun di Desa Gisting, pada tahun 1987 ia memutuskan untuk mengadu nasib di dusun Kapuran, Kecamatan Kota Agung yang lingkungannya mempunyai persamaan dengan daerah asalnya, yaitu daerah pesisir.

Di Kapuran ia merintis usaha pengolahan ikan (pembuatan ikan asin dan pindang). Penghasilan usaha ini tidak begitu besar tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil pengolahan ikan ia pasarkan ke berbagai daerah di Lampung seperti Kotabumi, Bandar Jaya bahkan sampai Jakarta. Modal awal yang di gunakan untuk merintis usahanya - 15 tahun yang lalu - sebesar Rp. 1 juta. Kini untuk sekali pembelian ikan di TPI dan biaya pengolahan ia harus mengeluarkan biaya tidak kurang dari Rp. 5 juta.

Peran KUPEDDES dari BRI cukup berarti dalam membantu pengembangan usahanya. Baru pada tahun 1997, untuk pertamakali permohonan kreditnya sebesar Rp. 3.000.000,- disetujui. Pinjaman dengan masa pengembalian 2 tahun itu diangsur Rp. 163.000,- per bulan. Kredit kedua diterima pada tahun 1999 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan waktu pengembalian satu tahun dan besar cicilan Rp. 563.000,- per bulan. Kredit yang kedua ini baru dilunasi awal tahun 2000. Dalam pengembaliannya Hadi sempat menunggak sampai 4 bulan karena pengaruh merosotnya produksi akibat *paceklik*.

Tidak ada kesulitan atau hambatan berarti bagi Hadi untuk mendapatkan kredit tersebut. Seluruh persyaratan seperti: fotocopy KTP peminjam, surat persetujuan istri, Surat Keterangan Lurah serta Akta Tanah dapat ia penuhi. Namun demikian, Hadi mengeluh mengenai biaya administrasi sebesar Rp. 150.000,- untuk proses pencairan dana kredit. Besarnya biaya sangat memberatkan dirinya. Tetapi, di pihak lain Hadi juga mengakui bahwa biaya itu tidak resmi. Uang tersebut ia berikan pada staf BRI sebagai ungkapan terimakasih atas cairnya kredit dan "Tahu sama tahu".

Untuk kebutuhan pengembangan usaha, sebagai anggota KUD Mina Hadi juga berusaha untuk mendapat kredit dari koperasi. Pada bulan Maret 2000 Hadi sudah mengajukan kredit, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Menurut penjelasan yang diberikan, KUD Mina dan anggota pengurus yang baru dirasakan belum dapat berperan sesuai dengan harapan anggota. Diharapkan di masa mendatang KUD Mina dapat berperan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu meningkatkan perekonomian anggotanya.

KUD-MINA Teluk Semangka

Sejak berada di bawah Ketua Koperasi yang baru (1999), KUD-Mina Teluk Semangka mengambil langkah konsolidasi ke dalam dan pembenahan manajemen. Salah satu langkah yang diambil dalam pembenahan manajemen adalah meniadakan/membekukan

kegiatan dari unit usaha-unit usaha yang tidak menguntungkan/tidak produktif, antara lain unit simpan-pinjam. Untuk sementara, KUD Mina berkonsentrasi pada pengelolaan TPI yang dianggap mampu memberikan pendapatan rutin pada koperasi.

Ketua KUD Mina mengakui bahwa pembekuan unit usaha simpan-pinjam berkaitan dengan masalah besarnya tunggakan pinjaman dan pinjaman macet-dari periode kepemimpinan sebelumnya yang diputihkan²¹. Masih sehubungan dengan pengalaman macetnya pinjaman, KUD Mina akhirnya juga memutuskan untuk tidak menyalurkan 17 skema kredit yang bisa dimanfaatkan koperasi. Menyangkut hal terakhir, pada dasarnya KUD Mina menghadapi masalah permodalan untuk bisa merealisasi penyaluran beberapa jenis kredit dari 17 skema kredit yang ada. Masalah yang dimaksud adalah ditolaknya pengajuan kredit pada bank. Penolakan pihak bank dapat dipahami mengingat kinerja finansial dan manajemen koperasi masih buruk.

USPS (Unit Simpan Pinjam Syariah, di Bawah Binaan Bank Muamalat Indonesia)

Salah satu skema kredit non-bank yang ditemui di Kalibening adalah Unit Simpan Pinjam Syariah yang merupakan salah satu unit usaha Koperasi Pondok Pesantren Asyafiah pimpinan ustadz Solihin Irsyad. Koperasi ini berdiri sejak tahun 1995 dan USPS mulai direalisasikan 8 Agustus 1999. Tujuan utama dibentuknya USPS adalah membantu masyarakat kecil, khususnya petani desa Kalibening dari jeratan rentenir, melalui suatu bentuk simpan pinjam berdasarkan Syariah Islam. Dimulai dari modal yang berasal dari kantong pribadi, unit usaha di bawah Koperasi Pondok Pesantren ini akhirnya dikembangkan dengan bantuan pembinaan dari Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada pelaksanaan tahap pertama besarnya pemberian pinjaman disamakan, yaitu Rp. 250.000,- yang dibagikan kepada 60 anggota. Untuk membantu administrasi USPS, pimpinan koperasi merekrut seorang manager. Tugasnya adalah mengerjakan pembukuan semua transaksi pinjaman dan pengembalian dari debitur. Manager digaji berdasarkan persentase pengembalian pinjaman.

Dalam usaha memperkenalkan USPS, ustadz Solihin yang juga ketua MUI Kabupaten Tanggamus benar-benar memanfaatkan kelebihan jabatannya. Sebagai Ketua MUI sekaligus juru dakwah ia sering diundang oleh masyarakat di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Tanggamus. Ketika memberikan ceramah sang ustadz memperkenalkan kegiatan USPS yang sedang dirintisnya. Hal ini akhirnya membuat USPS cukup dikenal masyarakat di luar Desa Kalibening. Karena itu cukup banyak anggota USPS yang berasal dari luar desa Kali Bening. Saat pengamatan berlangsung, jumlah anggota USPS 136 orang anggota (anggota tetap 91 orang). Dari jumlah itu, anggota yang berasal dari Desa Kalibening 65 orang.

²¹ Menurut keterangan Ketua KUD Mina Teluk Semangka yang baru, tunggakan pinjaman atau kredit macet dari unit simpan-pinjam mencapai lebih dari 90%. Karena itu, sebagai Ketua KUD ia memutuskan untuk memutihkan pinjaman tersebut. Faktor utama dari kemacetan kredit, menurut Ketua KUD adalah sifat para nelayan yang cenderung "mau menerima uang, tetapi sulit diharapkan untuk mengembalikannya". Karena masalah ini, Ketua KUD pernah terpaksa "menghajar" penunggak pinjaman di muka umum di TPI. Sebaliknya, pihak nelayan menyatakan bahwa keengganan mereka melunasi pinjaman disebabkan oleh sikap dan gaya manajemen para pengurus KUD yang tidak transparan. Menurut mereka, keuntungan KUD dari hasil lelang (pada tahun-tahun sebelum masa paceklik tiba) sangat besar. Tetapi selama KUD menikmati keuntungan besar, fasilitas yang diberikan KUD pada nelayan sangat kecil. Unit simpan-pinjam KUD dikatakan hanya melayani "orang-orang dekat" saja. Sementara nelayan yang kurang akrab dengan pengurus sangat sulit mendapatkan pinjaman. Hal inilah yang menjadi alasan mereka enggan membayar pinjaman, sebab KUD telah banyak menikmati keuntungan dari hasil lelang ikan.

Persyaratan utama untuk dapat meminjam di USPS adalah “hanya” keanggotaan dan niat tulus dari peminjam untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Peminjam hanya menyerahkan KTP dan memberi penjelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan.

Ada 3 jenis “paket pinjaman” yang ditawarkan oleh USPS, yaitu: 1) Musyarokah; 2) Mudlorobah; dan 3) Murobahah. Musyarokah adalah suatu bentuk usaha berdasarkan kerjasama, di mana keuntungan dan kerugian usaha ditanggung oleh kedua belah pihak (USPS dan penerima pinjaman). Mudlorobah adalah suatu bentuk usaha berdasarkan bagi hasil keuntungan usaha dengan persentase 60% untuk peminjam dan 40% untuk USPS. Yang terakhir, Murobahah adalah bentuk kerjasama di mana pihak USPS memberikan pinjaman senilai harga pasar barang tersebut. Dari ketiga bentuk kerjasama tersebut, baru sistem Murobahah yang berjalan.

Proses transaksi pinjaman Murobahah adalah sebagai berikut. Misalnya, seorang petani membutuhkan pinjaman untuk membeli pupuk. Pihak USPS mengetahui bahwa harga pupuk di pasar senilai Rp. 110.000,- per kwintal. Kepada peminjam, USPS akan menyerahkan pinjaman tunai sebesar Rp. 100.000,- tetapi nilai transaksi yang dicatat dalam pembukuan USPS adalah Rp. 110.000,- Selisih Rp. 10.000,- adalah sebagai pengganti biaya administrasi pembukuan USPS. Peminjam akan mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 110.000,-

Masa pengembalian pinjaman USPS di komunitas petani disesuaikan dengan masa satu kali musim tanam (6 bulan). Artinya, kalau petani meminjam pada saat tanam, maka harus mengembalikannya pada saat panen.

Realisasi USPS dengan persyaratan yang sangat mudah dan berlandaskan syariah²² serta penetapan “bunga” yang jauh di bawah skema kredit formal yang ada, telah mendorong minat banyak petani untuk meminjam. Karena dana yang terbatas, para peminat harus digilir. Namun, ternyata kegiatan simpan-pinjam USPS hanya berlangsung pada giliran pertama. Banyak petani yang belum dapat mengembalikan pinjamannya akibat kegagalan panen karena serangan *tungro*²³. Karena besarnya nilai total tunggakan, kegiatan USPS sementara ini mengalami kemacetan. Banyak petani yang menyayangkan kondisi ini, terutama mereka yang belum mendapat giliran.

Modal awal yang digunakan untuk usaha simpan-pinjam senilai Rp. 65 juta, yang merupakan modal gabungan dari dana sendiri Rp. 40 juta dan dana bantuan dari Golkar Rp. 25 juta.

²² Kehadiran USPS yang diperkenalkan oleh seorang ustadz dan sangat bemuansa Islami harus diakui sangat bisa diterima oleh komunitas petani yang hampir 100% beragama Islam. Pengenalan kegiatan simpan-pinjam yang dalam mekanismenya merealisasikan nilai-nilai syariah dengan demikian sangat mudah diterima oleh komunitas petani di Desa Kalibening dan sekitarnya.

²³ Dalam diskusi dengan sejumlah responden (petani nasabah USPS), pada umumnya mereka menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan mereka menunggak adalah diawali dengan masalah kegagalan panen. Kegagalan panen pada gilirannya menimbulkan dampak berantai pada kondisi ekonomi rumah tangga dan juga sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman dari USPS.

3.1.2. Kredit Informal

1. *Arisan Hajatan*

Ini adalah suatu kegiatan sosial-ekonomi yang bertujuan untuk membantu menutupi kebutuhan biaya penyelenggaraan hajatan yang diadakan oleh warga desa. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap warga desa secara konvensional²⁴, di bawah “tekanan” norma-norma sosial yang berlaku setempat, wajib memberi sumbangan pada penyelenggara hajatan baik dalam bentuk *natura* mau pun uang. Prinsip utama yang berlaku dalam kegiatan ini adalah resiprokalitas²⁵. Arisan hajatan ini khususnya ditemui di komunitas petani lahan basah di Desa Kalibening.

Pada masa krisis dan kegagalan panen secara berturut-turut, kewajiban untuk mematuhi “ketentuan” dalam kegiatan ini dirasakan sangat memberatkan sejumlah besar warga, khususnya dari kalangan (ter) miskin di Desa Kalibening. Sejumlah informan dari istri petani miskin sering mengeluh sumbangan ini meskipun hanya pada batas “normal”. Terlebih jika terjadi 2 atau 3 kali hajatan pada bulan yang sama. Batas normal sumbangan dalam nilai uang setara dengan Rp. 10 ribu - Rp. 15 ribu. Untuk bulan-bulan tertentu di mana banyak keluarga menyelenggarakan hajatan, seorang warga “terpaksa” harus mengalokasikan sekitar Rp. 30 ribu - Rp. 45 ribu per bulan. Bagi petani miskin yang akhir-akhir ini sangat kesulitan uang tunai tentu sangat berat menyediakan kebutuhan tersebut.

2. *Iuran Musibah/Iuran Kematian*

Kegiatan iuran ini hanya berlangsung saat terjadi musibah, umumnya kematian seorang warga desa. Kegiatan sosial ini ditemui di ketiga desa pengamatan. Pelaksanaan kegiatan iuran ini biasanya berlangsung di rumah keluarga yang berduka. Satu atau dua orang pengurus bertugas untuk mengumpulkan dana sumbangan untuk meringankan biaya penguburan. Kisaran iuran mulai dari Rp. 1.000,- hingga Rp. 2.000,-. Dari dana iuran yang terkumpul kemudian diberikan sebagai sumbangan (untuk pembelian kain kafan, biaya penyediaan konsumsi dan penggalian kubur) sebesar Rp. 80 ribu hingga Rp. 120 ribu. Dana iuran yang tersisa dikembalikan sebagai kas iuran musibah.

Iuran musibah ini berjalan cukup baik di ketiga desa. Terbukti dari perkembangan uang kas iuran dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Dari sisi masyarakat mereka banyak mengemukakan pendapat positif tentang kegiatan ini.

²⁴ Pengertian konvensi di sini dapat diartikan sebagai: “kesepakatan tidak tertulis, tidak diucapkan tetapi secara sosial dan etika interaksi sosial warga desa, kesepakatan itu memiliki kekuatan “memaksa” bagi warga desa untuk memberikan sumbangan pada penyelenggara hajatan. Kekuatan “memaksa” itu terlihat ketika seorang warga desa yang tidak mampu –pada masa krisis ini— harus berhutang *kanan-kiri* untuk bisa memenuhi kewajibannya memberikan sumbangan dalam bentuk “*natura*” (beras, ayam, tepung, dll) atau pun uang. Prinsip resiprokal (timbang-balik) dari kegiatan sosial-ekonomi sangat menonjol. Ada kepastian harapan bahwa jika suatu saat seorang menyelenggarakan hajatan maka warga lainnya akan melakukan hal yang sama.

²⁵ Dalam definisi operasional “kredit” yang digunakan Tim SMERU, sesungguhnya kegiatan arisan hajatan ini sedikit menyimpang. Prinsip yang berlaku dalam kegiatan ini, resiprokalitas, pada dasarnya tidak mempersyaratkan adanya “bunga” atau “biaya” tertentu. Namun demikian, kegiatan yang bernuansa sosial-ekonomi ini dapat digunakan oleh warga untuk mendapatkan pinjaman tertentu dari warga lain. Karena pertimbangan inilah arisan hajatan dikemukakan sebagai institusi informal yang dimanfaatkan warga untuk memperoleh pinjaman.

3. Arisan di Kalangan Kaum Perempuan

Setahun terakhir ini, menurut keterangan sejumlah informan, kegiatan arisan kelompok ibu-ibu di komunitas nelayan miskin (Dusun Kapuran) dan di komunitas petani (Desa Kalibening) semakin menurun. Bahkan di sejumlah RT di lingkungan permukiman yang disebut di atas kegiatan tersebut sudah berhenti. Alasan berhentinya kegiatan itu adalah kesulitan uang untuk membayar iuran arisan. "*Sekarang ini, jangankan untuk membayar uang arisan, untuk makan sehari-hari saja susahnya setengah mati*". Selain itu, akhir-akhir ini semakin sering terjadi peserta arisan tidak pernah datang lagi ke arisan. Bahkan walau ditagih ke rumah setelah mendapat lot sulit diharapkan peserta tersebut melunasi kewajiban iurannya.

Kegiatan arisan yang masih berjalan baik umumnya hanya ditemui di kelompok arisan yang beranggotakan warga dari strata ekonomi menengah ke atas. Anggota arisan dari kelompok ini bahkan banyak yang menjadi peserta lebih dari 1 kegiatan arisan. Besarnya iuran setiap arisan cukup besar, yaitu antara Rp. 5 – Rp. 25 ribu, dan jumlah pesertanya ada yang mencapai 15 anggota.

Salah satu responden dari kalangan menengah di Dusun Kapuran, Rohana (nama samaran), 27 tahun, istri pemilik warung, mengikuti arisan harian masing-masing dengan iuran Rp. 5.000,- dan Rp. 8.000,-. Arisan pertama mempunyai anggota 12 orang dan sudah berjalan satu tahun. Sedangkan arisan kedua diikuti 10 peserta, baru berjalan 2 bulan. Arisan ini dibayar dengan hasil penjualan es batu untuk pengawetan ikan dari kulkas di warungnya.

4. Warung

Yang dimaksud dengan warung dalam laporan ini adalah kios/toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok (beras, gula, kopi, minyak goreng, minyak tanah, dll) maupun barang-barang kebutuhan lain termasuk sarana produksi. Jenis barang yang terakhir umumnya hanya disediakan oleh kios/toko besar. Baik di komunitas nelayan maupun komunitas petani lahan basah, peran warung sangat besar. Khususnya sebagai tempat untuk berhutang keperluan bahan pokok sehari-hari, tempat untuk meminjam sarana produksi atau biaya operasional produksi.

Di komunitas nelayan, sebuah warung umumnya sudah memiliki langganan tetap sejumlah nelayan (istilah lokal: "*langgan*"). Para nelayan *langgan* tersebut umumnya akan meminjam berbagai keperluan sebelum berangkat melaut seperti: solar, minyak tanah, minyak goreng, beras, gula, kopi dan rokok. Pinjaman tersebut akan dilunasi saat nelayan pulang melaut. Tidak ada ketentuan yang kaku bahwa pinjaman *in natura* harus dilunasi dengan uang tunai atau pinjaman tunai dilunasi secara tunai.

Warung Haji Maggu, asal Sulawesi Selatan, di Kapuran, menerima pelunasan baik dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk hasil tangkapan. Kesepakatan utama di sini adalah nilai pengembalian harus lebih tinggi dari nilai pinjaman. "*Yaa.. kita di sini sudah tabu semua aturannya*", jawab mantan nelayan ketika ditanya mengenai ketentuan pelunasan. Misalnya, seorang nelayan udang peci meminjam keperluan melaut (minyak tanah, rokok dan bekal sarapan) di warung Maggu sebesar Rp. 10.000,-. Jika hasil tangkapan udang cukup baik, nelayan peci bisa mendapat hasil hingga 2 kg udang yang nilai jual di pasar setempat sekitar Rp. 30 ribu. Nelayan ini akan mengembalikan pinjaman sekitar Rp. 12 –

Rp. 13 ribu. “Dua atau tiga ribu Rupiah (kelebihan) itu sebenarnya ucapan terima kasih, sebab kita sudah dibantu modal”, tutur seorang responden dari kalangan nelayan udang peci.

Adakalanya Haji Maggu sebelumnya berpesan pada nelayan peminjam agar mengembalikan pinjaman dalam bentuk hasil tangkapan tertentu karena Haji Maggu ini juga menjadi pedagang perantara ikan kecil-kecilan. Bila bentuk pelunasan seperti ini yang diharapkan, maka nelayan akan menjual hasil tangkapannya kepada warung Maggu dengan harga “miring”. Selisih “kemiringan” itupun kisarannya hanya sekitar Rp. 1.000 – 2.000,- dari harga pasar.

Selisih itu pada dasarnya sudah memperhitungkan *margin* keuntungan yang bisa diperoleh Haji Maggu. Dan, setiap nelayan tahu persis tentang hal ini. Dengan demikian “bunga pinjaman” dalam bentuk “ucapan terima kasih” sudah dipertimbangkan secara rasional oleh peminjam dan yang meminjam. Nilai pelunasan disepakati pada tingkat persentase yang pantas, yaitu dengan “bunga” berkisar 10% - 20%. Semakin kecil nilai pinjaman dan semakin rendah status sosial-ekonomi seorang peminjam, semakin kecil pula *margin* pelunasan yang ditetapkan. Sebaliknya, semakin besar nilai pinjaman dan semakin tinggi status sosial-ekonomi peminjam, semakin besar *margin* yang diberikan.

Transaksi ekonomi dalam nuansa sosial yang kental ini cukup mewarnai interaksi antara pemilik warung dan para *langgan*-nya. Kepercayaan adalah unsur terpenting dalam interaksi tersebut. Realitas ini tercermin pada masa *paceklik* di mana para nelayan masih terus bisa berhutang atau mendapat pinjaman modal sementara pelunasannya tidak mudah untuk dipastikan. Namun jika saat pelunasan tiba, para *langgan* atau peminjam itu tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih dalam bentuk nilai pelunasan yang pantas.

Kenyataan inilah yang membuat interaksi sosial sekaligus transaksi ekonomi antara warung dan *langgan* sulit diputus dengan masuknya skema kredit formal terlebih oleh skema-skema kredit yang kaku menerapkan ketentuan formal.

5. Pelepas Uang/Rentenir

Di desa-desa yang dikunjungi istilah pelepas uang atau rentenir sering diasosiasikan dengan seseorang dari kelompok etnis tertentu, dalam hal ini Suku Batak. Para pelepas uang ini umumnya beroperasi dari pintu ke pintu dan dari desa yang satu ke desa yang lain. Target utama mereka adalah pedagang-pedagang warung yang tidak terlampau besar, pedagang pasar juga individu/warga desa lain yang sedang dalam keadaan sangat membutuhkan uang.

Umumnya warga desa tahu persis resiko meminjam uang pada rentenir keliling ini. Oleh sebab itu jika ada seseorang yang meminjam pada rentenir hampir dapat dipastikan bahwa seseorang itu sudah tidak mempunyai pilihan lain. Alasannya bisa bermacam-macam. Tetapi yang umum adalah orang tersebut sudah terlanjur malu untuk meminjam uang/berhutang lagi pada pihak yang sering ia datangi untuk mendapatkan pinjaman hutang baru. Dilatarbelakangi rasa malu tersebut, seseorang kemudian menetapkan pilihan terakhir dengan meminjam pada rentenir.

Kisaran pinjaman yang diberikan rentenir umumnya mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu Rupiah. Sistem pembayaran yang diterapkan adalah pembayaran (cicilan) harian dengan rumus: 30 x 40 atau sebaliknya 40 x 30. Rumus pertama artinya membayar

selama 30 hari dengan bunga 40%, dan yang kedua membayar selama 40 hari dengan bunga sebesar 30%. Dengan demikian rata-rata bunga pinjaman adalah 40% dengan jangka waktu pinjaman sekitar satu bulan.

Walaupun data akurat tentang jumlah peminjam tidak diperoleh, namun informasi dari berbagai sumber di desa menyebutkan bahwa dalam setahun terakhir ini semakin banyak warga desa yang terjerat dalam hutang-piutang dengan rentenir.

6. Tengkulak

Tengkulak dalam uraian ini berlaku baik di komunitas nelayan maupun petani lahan basah. Di kalangan nelayan Kelurahan Pasar Madang lebih dikenal dengan istilah tengkulak. Sedangkan di Desa Kalibening - yang kebanyakan terdiri dari masyarakat etnis Jawa - akrab dengan istilah *Ijon* (pedagang/pelepas uang yang memberi pinjaman atau membeli padi di saat tanaman padi masih hijau).

Pilihan masyarakat untuk mendapat pinjaman pada tengkulak biasanya dilakukan bila terjadi dalam keadaan terdesak. Dasar pertimbangan untuk meminjam pada tengkulak tidak berbeda dengan pertimbangan untuk meminjam pada rentenir. Sebab, pada dasarnya masyarakat di desa-desa yang dikunjungi mengetahui beratnya resiko pengembalian karena tingkat bunga yang mencekik.

Walaupun tidak sempat menemui tengkulak, Tim SMERU memperoleh informasi dari responden (Ketua Kelompok Tani Barokah, Desa Kalibening) yang pernah meminjam pada tengkulak. Responden meminjam uang karena terdesak. Ia membutuhkan uang tunai yang cukup besar untuk keperluan keluarga, dan pinjaman tersebut tidak mungkin ia dapatkan dari warga desanya sendiri. Karena itu ia menemui tengkulak di kota Kecamatan Talang Padang untuk mencari pinjaman yang ia butuhkan. Dalam penjelasannya responden menjelaskan bahwa karena ia sudah mengenal baik *tauke* pemilik toko tempat ia biasa membeli pupuk, ia dikenakan bunga yang khusus, artinya cukup rendah. Tetapi serendah-rendahnya tingkat bunga tengkulak masih berkisar 30% untuk masa pinjaman selama 6 bulan. Ia juga mengatakan bahwa tingkat bunga yang umum dikenakan oleh tengkulak itu adalah sekitar 40%.

Para tengkulak umumnya juga beroperasi sebagai pedagang pengumpul hasil bumi. Mereka ini berkeliling desa pada saat-saat panen komoditas pertanian (padi, palawija, kopi dan lada). Dengan berkeliling sambil membeli hasil pertanian setempat mereka juga mencari kemungkinan untuk bisa mendapatkan pelanggan.

7. Juragan/Pemilik Kapal

Dalam kebanyakan komunitas nelayan juragan atau pemilik kapal dapat disebut sebagai patron tradisional. Juragan kapal adalah figur di komunitas itu yang menyediakan lapangan kerja, sarana kerja dan modal operasional. Pemilik kapal seperti Haji Payang (nama samaran) biasanya memiliki anak buah kapal, juru mudi dan juru mesin tetap. Mereka ini dapat disebut sebagai klien Haji Payang. Bagi awak kapal tersebut keberadaan Haji Payang bukan hanya sekedar *juragan kapal*. Tetapi, lebih jauh dari itu, Haji Payang juga berperan sebagai katup penyelamat ekonomi rumah tangga di saat-saat sulit, atau ketika ada keperluan uang tunai yang mendadak.

Pengertian sebagai *juragan* kapal adalah seseorang yang memberikan kesempatan kerja dan hubungan bisnis berlandaskan ketentuan-ketentuan baku. Contoh, untuk setiap kapal payang yang melaut, seluruh sarana penangkapan ikan (kapal dan jaring), serta kebutuhan operasional (solar, minyak tanah, beras, minyak goreng, gula, kopi serta es balok) disediakan oleh juragan kapal. Jadi awak kapal tinggal mengoperasikan kapal dan mencari ikan. Hasil bersih tangkapan, berupa uang tunai penjualan ikan yang diperoleh setelah lelang di TPI, terlebih dahulu dipotong dengan biaya operasional. Misalnya, hasil bersih Rp. 10 juta dikurangi biaya operasional kapal payang sekitar Rp. 200 ribu.

Sisa uang setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi dua (50:50). 50% pertama merupakan milik juragan sebagai pihak penyedia sarana penangkapan ikan. 50% sisanya dibagikan pada awak kapal. Pembagian untuk awak kapal ini juga berdasarkan persentase tertentu. Juru mudi menerima bagian yang terbesar (sekitar 30%), juru mesin (20%) dan 50% sisanya dibagi rata untuk anak buah kapal atau buruh nelayan (penggiring ikan dan penarik jaring) yang jumlahnya rata-rata sekitar 10 orang.

Sebagai tempat untuk meminjam kebutuhan uang tunai yang bersifat mendadak dan mendesak Haji Payang menerapkan ketentuan yang berbeda. Dalam kaitan ini, ditetapkan berlakunya bunga pinjaman. Menurut penuturan juragan kapal ini, *margin* keuntungan atau bunga yang berlaku adalah sekitar 20% - 30%. Namun demikian, ada unsur-unsur pertimbangan sosial tertentu yang berlaku. Artinya, ketentuan *margin* atau bunga bisa lebih rendah jika yang meminjam adalah awak kapalnya sendiri. Sebaliknya bila ada nelayan yang bukan awak kapalnya meminta pinjaman, maka tingkat bunga yang ditetapkan bisa berbeda (kisarannya bisa 30% - 40%).

Kenyataan pemberlakuan “pertimbangan sosial” dalam mekanisme pinjam-meminjam ini terlihat pada musim *paceklik* terakhir. Dorongan rasa tanggung jawab sebagai patron atau katup penyelamat masih berlaku. Para awak kapal perlu untuk tetap dibantu mengatasi kesulitan mendapatkan biaya hidup sehari-hari. Membantu ekonomi rumah tangga awak kapal sebenarnya diperlukan oleh Haji Payang untuk menjaga berlangsungnya hubungan baik dengan para awak kapal tersebut. Sebab bagaimana pun *juragan* kapal itu menyadari bahwa tanpa awak kapal tidak mungkin kapalnya beroperasi untuk mencari ikan dan memberi keuntungan baginya.

8. *Lambung Masjid*

Lambung masjid dapat dikatakan pranata sosial-ekonomi dalam wadah lembaga keagamaan yang unik yang ditemui di Desa Kalibening. Dalam pelaksanaan kegiatan lumbung, masyarakat petani diwajibkan untuk menyumbangkan gabah, minimal satu kaleng (setara 20 liter gabah kering giling), pada setiap panen. Diharapkan masyarakat bisa menyumbang lebih dari satu kaleng (pada kenyataannya warga desa umumnya menyumbang lebih dari 1 kaleng)²⁶.

Karena jumlah sumbangan ini ternyata cukup besar, maka stok yang ada di lumbung dapat digunakan/dipinjam oleh masyarakat pada saat *paceklik*. Dalam setahun, oleh

²⁶ Gagasan dasar pengumpulan gabah ini adalah untuk pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan masjid. Hal ini dirasakan perlu, sebab penggagas lumbung masjid (seorang elit ekonomi desa) merasa malu apabila harus meminta-minta sumbangan di sepanjang jalan. Melalui kegiatan Lumbung Masjid keperluan biaya perawatan dan pengembangan masjid dapat dipenuhi, sisanya dimanfaatkan oleh warga yang sewaktu-waktu membutuhkan bantuan. Lumbung Masjid ini dikelola oleh Majelis Masjid yang diketuai oleh Kepala Desa.

Ketua Majelis - saat ini dijabat oleh Kepala Desa - lumbung dibuka 2 kali. Pembukaan lumbung atau kesempatan meminjam di lumbung umumnya dilakukan pada masa-masa setelah musim tanam berlangsung. Di masa-masa itu umumnya kebutuhan petani akan bahan pokok sedang mencapai puncaknya. Sebab, biasanya setelah musim tanam petani tidak memiliki uang tunai karena digunakan untuk keperluan tanam (biaya mengolah lahan, biaya tanam, biaya membuat pupuk, pestisida, dll.) Biasanya pada saat itu intensitas petani untuk mencari pinjaman sangat tinggi. Lumbung masjid tidak dibuka pada kesempatan lain.

Anggota warga desa yang meminjam akan mengembalikan gabah pada saat musim panen berikut. Jumlah gabah yang dikembalikan ditetapkan sekitar 30 liter untuk setiap satu kaleng gabah yang dipinjam. Namun, pada umumnya si peminjam akan mengembalikan dalam jumlah yang lebih banyak dari yang ditetapkan. Pengembalian yang lebih besar pada dasarnya dikaitkan dengan tindakan amal-ibadah untuk pembangunan masjid sekaligus untuk jaminan akan memperoleh pinjaman lagi jika kelak mereka membutuhkan.

Pada masa krisis yang diperburuk dengan serangan hama padi, seperti pada saat pengamatan berlangsung, arti penting lumbung masjid sangat dirasakan oleh petani miskin. Mereka sangat mensyukuri keberadaan lumbung yang digagas oleh salah seorang elit ekonomi desa.

3.1.3. Kredit Program

1. KUT

Realisasi program ini relatif hanya ditemui di Desa Kalibening. Secara umum pelaksanaan program KUT periode 1998/1999 di Kecamatan Talang Padang dapat dikatakan gagal. Kegagalan program KUT ini dapat ditinjau dari sisi petani dan juga dari sisi pelaksana KUT. Dari sisi petani, kendala utamanya adalah masalah besarnya tunggakan. Di kecamatan Talang Padang, keluhan kegagalan panen karena serangan *tungro* merupakan alasan umum. Serangan hama itulah yang dijadikan sebagai latar belakang mengapa mereka menunggak pelunasan KUT. Sementara itu, dari sisi pelaksana program, sudah menjadi rahasia umum di kalangan petani bahwa banyak pengurus koperasi, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) dan LSM yang melakukan penyelewengan dana atau manipulasi pinjaman. Karena kegagalan atau macetnya pengembalian kredit periode sebelumnya inilah, maka pencairan dana Program KUT 1999/2000 untuk Kecamatan Talang Padang tertunda.

2. PDM-DKE

Seperti halnya program KUT, program ini secara umum juga dinilai gagal. Dana bergulir berhenti pada kelompok-kelompok peminjam pertama. Perguliran berhenti karena kelompok peminjam pertama tidak mampu mengembalikan pinjaman. Faktor lain yang perlu dicatat dalam kemacetan dana PDM-DKE adalah sikap mental pengelola dana dan anggota masyarakat peminjam. Menurut sejumlah informan, banyak para penerima dana PDM-DKE menganggap dana tersebut merupakan hibah dari pemerintah. Sementara itu, jika penerima dana mengembalikan pinjaman mereka juga tidak yakin apakah dana itu akan digulirkan kembali pada warga lain yang membutuhkan atau hanya akan “dimakan” oleh pengurusnya.

3.2. Akses dan Pilihan Masyarakat terhadap Kredit Perdesaan

3.2.1. Akses

Akses masyarakat di tiga desa amatan terhadap kredit formal secara umum dapat dikatakan kecil. Beberapa indikasi tampak dari: i) kecilnya persentase atau jumlah kelompok yang dapat mengakses kredit formal; dan yang termasuk dalam kelompok ini tergolong elit ekonomi desa. Persentase mereka hanya berkisar 5% - 10%; ii) terbatasnya lembaga keuangan formal yang menyediakan skema kredit formal; iii) persentase kelompok masyarakat yang secara umum tidak memiliki persyaratan dasar yang diperlukan untuk bisa mengakses kredit formal relatif besar. Kelompok ini merupakan masyarakat lapis bawah atau kelompok miskin dan termiskin desa.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada satupun informan (dari kalangan nelayan dan petani miskin) yang menjadi nasabah dari skema kredit formal. Pada saat beban kesulitan ekonomi meningkat akibat dampak *krismom*, musim paceklik tangkapan dan serangan hama tungro, maka kelompok nelayan dan petani miskin semakin tergantung pada patron ekonomi tradisional mereka. Dan, yang jauh lebih buruk mereka - dalam keadaan sangat terpaksa - harus berhubungan dengan pelepas uang.

Kondisi yang cukup jauh berbeda dirasakan oleh kalangan strata menengah (sebagian besar) dan atas. Baik di komunitas nelayan maupun petani aksesibilitas kelompok ini skema kredit formal dapat dinilai baik. Hal yang tidak dipungkiri adalah bahwa pada masa krisis ini pihak lembaga keuangan formal (Bank) bertindak lebih selektif dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Konsekuensinya adalah untuk jumlah kredit tertentu - dengan nilai di atas Rp. 20 juta - kian sulit diperoleh.

3.2.2. Hambatan

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan untuk memperoleh kredit formal antara lain adalah:

- Ketersediaan lembaga keuangan formal di desa-desa yang dikunjungi masih minim/terbatas. Di ketiga desa yang dikunjungi hanya terdapat BRI Unit Desa dan BPD yang secara mudah dijangkau oleh masyarakat tetapi secara kelembagaan sulit didekati. Sementara itu, kucuran kredit KUD selama dua tahun terakhir ini tidak bisa diharapkan kucurannya karena rata-rata KUT sudah membekukan kegiatan unit simpan pinjamnya.
- Keterbatasan keberadaan lembaga keuangan formal juga diikuti dengan minimnya skema kredit yang dapat diakses oleh masyarakat. Khususnya skema kredit formal yang memang dirancang untuk nelayan kecil dan petani miskin.
- Persyaratan perolehan kredit masih sangat sulit dipenuhi oleh kelompok miskin dan termiskin di komunitas nelayan dan petani. Aspek kolateral dan administrasi adalah kendala utama yang membatasi aksesibilitas nelayan dan petani miskin terhadap skema kredit formal. Di samping itu, pada umumnya nelayan dan petani miskin yang berpendidikan relatif rendah kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan formal seperti bank. Karena itu ada semacam keengganan, bahkan rasa takut, untuk berhubungan dengan bank. Sebaliknya, bagi

kalangan strata menengah dan atas aspek kolateral dan administrasi tidak menjadi halangan. Kalangan ini juga mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman berinteraksi dengan bank.

- Waktu pencairan tidak tepat (khususnya untuk KUT) sehingga dana yang telah cair tidak dapat optimal dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang produktivitas petani, bahkan cenderung sia-sia karena sering digunakan untuk keperluan konsumtif.
- Informasi yang menyangkut program kredit khusus tertentu (KUT, PDM-DKE) secara umum sangat terbatas. Kelemahan ini bukan hanya membingungkan mayoritas petani miskin yang tingkat pendidikannya rendah tetapi juga membuka peluang bagi oknum tertentu (seperti pengurus KUD) untuk melakukan kecurangan.
- Tidak memadainya informasi dan sosialisasi tentang skema-skema kredit perdesaan yang ada pada para nelayan dan petani miskin. Hal ini juga diperburuk dengan sangat rendahnya kegiatan pendampingan/pembinaan dalam pemanfaatan kredit perdesaan baik di komunitas petani atau pun nelayan.

3.2.3. Pilihan

- Kalangan ekonomi mapan, baik di komunitas nelayan mau pun petani lahan basah, umumnya cenderung memilih KUPeDES dari BRI. Pilihan ini dipengaruhi oleh beberapa keuntungan/kelebihan yang dimiliki oleh kalangan ekonomi mapan, antara lain: i) memiliki cukup pengetahuan untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan formal, di samping itu juga mengetahui cara “pendekatan” pribadi pada staf bank atau koperasi; ii) kemampuan memenuhi persyaratan kolateral; iii) memiliki usaha/bisnis yang layak digunakan sebagai jaminan (bagi staf bank, adanya usaha yang prospektif mempengaruhi pertimbangan disetujui atau tidaknya pemberian kredit); iv) bunga kredit BRI relatif sedikit lebih ringan dibandingkan dengan BPD atau bank swasta lain; v) adanya insentif pembayaran tepat waktu (IPTW) dari BRI; vi) sedikitnya pilihan dalam memperoleh skema kredit dan keberadaan BRI relatif lebih mudah diakses dibanding BPD atau bank swasta lain (terutama di wilayah pengamatan).
- Golbertap pada umumnya juga cenderung memilih KUPeDES dari BRI. Pilihan Golbertap pada KUPeDES pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa keuntungan: i) memiliki penghasilan tetap bulanan; ii) cukup memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan formal, khususnya Bank; iii) mampu memenuhi persyaratan kolateral; iv) suku bunga relatif lebih rendah dibanding bank lain.
- Golongan nelayan dan petani miskin umumnya semakin tergantung pada berbagai jenis kredit informal yang bisa diakses dengan mudah di lingkungan desa mereka. Gejala yang semakin nyata adalah ketergantungan nelayan dan petani miskin secara finansial pada patron ekonomi tradisional mereka semakin besar, seperti kepada pemilik kapal, elit ekonomi desa, pengusaha desa dan warung. Bila terdesak ke tengkulak pun mereka lakukan, dan, dalam keadaan sangat terpaksa pada pelepas uang.

- Kehadiran lembaga keuangan bernafaskan syariah Islam seperti USPS memang sangat didambakan oleh masyarakat petani miskin Desa Kalibening. USPS memiliki semua unsur skema kredit perdesaan ideal seperti: i) persyaratan sangat mudah (hanya KTP, keanggotaan koperasi, dan niat tulus mengembalikan pinjaman; ii) biaya administrasi yang sangat murah; iii) tingkat perhitungan “bunga pinjaman” sesuai yang diharapkan, yaitu di bawah 10%/MT; iv) sistem pengembalian yang mempertimbangkan siklus ekonomi petani (pinjam masa tanam, pelunasan masa panen); v) dapat dihubungi setiap saat; serta vi) keberadaan yang dekat di tengah-tengah masyarakat. Sayang serangan hama yang menggagalkan panen 4 kali berturut-turut telah menghentikan realisasi skema kredit ini.

IV. KREDIT PERDESAAN DI MASA KRISIS

Temuan lapangan menunjukkan adanya faktor-faktor di luar kondisi krisis (seperti naiknya harga-harga barang pokok, sekunder dan sarana produksi) yang berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian masyarakat perdesaan pada umumnya termasuk terhadap kredit perdesaan. Faktor-faktor yang dimaksud a.l.: 1) lingkungan alam; dan 2) kebijakan pemerintah dalam penetapan harga atau intervensi terhadap mekanisme pasar untuk komoditi tertentu; 3) fluktuasi harga komoditas (pertanian, perkebunan dan perikanan) di pasar lokal dan internasional.

1. *Faktor Lingkungan Alam*

Di ketiga desa yang dikunjungi, didapati bahwa faktor lingkungan alam ternyata mempunyai pengaruh berarti terhadap perekonomian rumah tangga responden. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan alam ini adalah masa *paceklik*²⁷ tangkapan ikan

²⁷ Masa *paceklik* dapat diartikan sebagai suatu masa di mana hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan yang sangat berarti. Di kalangan nelayan pada umumnya dikenal masa *paceklik* yang bersifat siklus, baik bulanan maupun tahunan. Masa *paceklik* bulanan umumnya terjadi pada periode “bulan terang” atau saat bulan muncul yang berlangsung sekitar 2 minggu setiap bulan. Pada periode ini, jumlah tangkapan umumnya menurun, namun tidak seluruh hari pada periode tersebut hasil tangkapan menurun. Ada kalanya pada periode “bulan terang” pun hasil tangkapan lumayan baik. Hasil tangkapan akan kembali “normal” pada periode “bulan mati”. Masa *paceklik* kedua bersifat siklus tahunan. Masa ini berkaitan dengan perubahan cuaca atau perubahan arah angin yang berlangsung sekitar 3 bulan dalam setahun (sekitar bulan Nopember hingga Januari). Periode ini umumnya dikenal dengan istilah “Musim (angin) Barat” atau “Musim Tenggara”. Di perairan Teluk Semangka lebih dikenal “Musim Tenggara”. Penurunan hasil tangkapan ini terjadi karena umumnya nelayan tidak turun ke laut akibat cuaca yang-pada masa itu-tidak bersahabat. Sebab, umumnya pada “Musim Barat” atau “Tenggara” kondisi laut berombak besar disertai hujan dan angin bertiup kencang, bahkan tidak jarang disusul badai. Namun demikian, tidak sepanjang 3 bulan cuacanya selalu buruk. Jika cuaca memungkinkan, nelayan pun turun melaut pada musim angin besar tersebut. Masa *paceklik* yang dialami oleh komunitas nelayan Kota Agung saat ini, menunjukkan gejala di luar karakter siklus *paceklik* yang ada. Sejauh ini, gejala *paceklik* tersebut tidak diketahui apakah merupakan masa *paceklik* yang berhubungan dengan siklus masa yang lebih panjang (10 tahunan atau lebih lama lagi), atau karena disebabkan faktor lain, misal kerusakan lingkungan, *over fishing*, atau adanya pencemaran perairan. Hasil wawancara dengan nelayan, menunjukkan bahwa selama ini, baru pertama kali terjadi periode *paceklik* yang begitu panjang (saat pengamatan berlangsung sudah memasuki tahun kedua). Pada masa-masa sebelumnya, sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu, tidak pernah terjadi gejala seperti yang mereka alami sekarang. Berdasarkan hal itu, sejumlah nelayan kemudian mengaitkan masa *paceklik* kali ini dengan faktor-faktor degradasi kualitas lingkungan perairan dan kecenderungan terjadinya *over fishing* di perairan Teluk Semangka. Kecurigaan terjadinya degradasi kualitas perairan ini berkaitan dengan adanya Depot Bahan Bakar Pertamina di Kota Agung. Keberadaan depot tersebut dihubungkan dengan kegiatan sejumlah kapal tanker yang beroperasi di kawasan perairan Teluk Semangka. Menurut nelayan, tidak jarang mereka melihat tanker-

(untuk komunitas nelayan) dan serangan hama *tungro* (penyakit akar merah) yang mengakibatkan gagal panen (di komunitas petani lahan basah). Dampak langsung *paceklik* dan serangan *tungro* ini adalah merosotnya pendapatan secara berarti di kedua komunitas tersebut.

Pada komunitas nelayan di Dusun Kapuran dan Desa Karang Buah, penurunan pendapatan dialami oleh seluruh strata sosial-ekonomi - dengan tingkat dampak yang bervariasi. Ketua KUD-Mina Teluk Semangka yang juga pengurus TPI menyebutkan bahwa *paceklik* panjang telah menyebabkan turunnya nilai total pelelangan ikan di TPI Kota Agung. Sebelum tahun 1998 nilai total pelelangan dapat mencapai Rp. 200 – Rp. 300 juta per bulan. Dua tahun terakhir ini nilai lelang tidak pernah melampaui Rp. 100 juta per bulan. Kondisi *paceklik* ini memaksa Haji Payang - seorang *juragan* kapal terbesar di Kota Agung - menunggak cicilan kredit KUPEDES selama 6 bulan. Bukan hanya itu, ia juga tidak mampu membeli atau memperbaiki mesin kapalnya yang rusak karena mahalnya harga mesin dan komponen mesin.

Dari berbagai kondisi yang terjadi di komunitas nelayan dan petani, dampak paling menonjol adalah kecenderungan semakin rendah tingkat perekonomian rumah tangga semakin besar dampak ekonomi yang dirasakan. Musim *paceklik* dan serangan *tungro* yang sudah berlangsung hampir 2 tahun tak dapat dipungkiri telah membuat kondisi ekonomi nelayan dan petani miskin semakin terpuruk.

Bagi nelayan kecil²⁸ yang sudah sejak lama terjerat hutang pada patron tradisional mereka, pengaruh kondisi *paceklik* terhadap hasil tangkapan dua tahun terakhir ini sungguh besar

tanker sewaktu berlabuh di tengah laut membuang limbah kapal dan *ballast* di perairan itu. Nelayan juga menginformasikan bahwa lebih dari setahun terakhir, kegiatan kapal tanker dan depot Pertamina sudah jauh berkurang. Saat pengamatan berlangsung, Tim SMERU hanya menyaksikan dua buah kapal tanker saja. Sebelum tahun 1998 kegiatan depot sangat tinggi dan jumlah kapal tanker yang beroperasi sangat banyak (tidak kurang dari 10 kapal selalu terlihat berlabuh di tengah laut setiap hari).

Kondisi lain yang juga dianggap oleh nelayan berpengaruh adalah gejala *over fishing* di perairan Teluk Semangka. Gejala ini dikaitkan dengan beroperasinya nelayan dari berbagai wilayah Jawa dan Sumatra di perairan tersebut. Berkait dengan gejala *over fishing*, dua tahun terakhir ini nelayan Kota Agung menyatakan bahwa mereka harus mencari ikan di perairan yang lebih jauh. Jika sebelumnya mereka cukup mencari ikan di Teluk Semangka, kini mereka seringkali harus ke perairan Teluk Belimbing yang merupakan perairan laut dalam. Di samping gejala-gejala di atas, para nelayan, khususnya para nelayan pancing dan nelayan udang peci, sangat mengeluhkan beroperasinya kapal *trawl* (pukat harimau) ukuran sedang dan kecil di Teluk Semangka. Saat pengamatan berlangsung, mereka menyebutkan tidak kurang dari 14 kapal *trawl* masih beroperasi. Walaupun Pemda Lampung sudah memberlakukan Perda yang melarang pengoperasian kapal penangkap ikan destruktif tersebut, namun nelayan masih terus menyaksikan kapal-kapal tersebut beroperasi dengan bebas. Konflik antara nelayan kecil dengan nelayan *trawl* sudah sering terjadi. Bahkan pembakaran kapal *trawl* pun pernah terjadi pada akhir 1999. *Trawl* yang beroperasi di perairan dangkal (*on shore*) telah diduga menimbulkan kerusakan ekosistem cukup parah. Nelayan udang peci dan nelayan pancing merupakan kelompok nelayan yang paling merasakan dampak dari rusaknya ekosistem laut dangkal. Gejala ini ditandai dengan semakin sulitnya mendapatkan udang dan ikan di perairan itu.

Sejauh ini, faktor utama penyebab terjadinya *paceklik* panjang di komunitas nelayan belum dapat dipastikan. Namun dengan mempertimbangkan berbagai aktifitas di sekitar perairan Teluk Semangka, masalah *paceklik* tersebut sangat mungkin terjadi karena adanya kombinasi dari: 1) faktor degradasi kualitas perairan (pencemaran limbah), 2) kerusakan ekosistem laut dangkal (akibat beroperasinya *trawl*), serta 3) gejala *over fishing*. Penelitian lebih jauh dan lebih komprehensif tampaknya perlu dilakukan di perairan Teluk Semangka.

²⁸ Pengertian nelayan kecil untuk komunitas nelayan di Kota Agung dan pulau Tabuan adalah: 1) anak buah kapal jaring payang atau jaring purnin yang bertugas sebagai penarik jaring dan penggiting ikan. Dalam laporan ini, mereka juga disebut sebagai buruh nelayan atau nelayan yang tidak memiliki perahu dan bekerja pada juragan (pemilik kapal); 2) nelayan perahu katir yang pada umumnya merupakan nelayan penangkap udang “peci/jerbung” (istilah lokal); 3) nelayan pancing.

sekali. Nilai total hutang mereka pada patron (pemilik kapal atau warung yang memberi hutang) semakin membengkak. Nilai hutang rata-rata nelayan kecil atau buruh nelayan saat ini berkisar antara Rp. 50 ribu hingga Rp. 1 juta.

Situasi yang kurang lebih sama juga dialami komunitas petani lahan basah di Desa Kalibening. Faktor lingkungan (alam) seperti serangan hama *tungro* pada empat musim tanam terakhir ini sangat memukul perekonomian petani. 70% petani Kalibening adalah buruh tani atau penggarap sawah yang hidup di tingkat subsistensi. Kegagalan panen pada 4 musim tanam terakhir yang bersamaan dengan masa krisis telah menyebabkan merosotnya pendapatan petani secara drastis. Lebih dari itu, buruknya panen, secara nyata berakibat pada membengkaknya jumlah hutang buruh tani dan penggarap pada patron ekonomi tradisional mereka (pemilik sawah/pengusaha/orang kaya desa, pemilik warung, tengkulak hingga pelepas uang). Dengan kata lain intensitas dan frekuensi mencari pinjaman atau berhutang semakin tinggi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kisaran hutang buruh tani dan penggarap tidak jauh berbeda dengan kelompok buruh nelayan, yaitu dari Rp. 50 ribu - Rp. 1 juta. Jumlah hutang tersebut adalah jumlah hutang kumulatif, yaitu menumpuknya tunggakan hutang dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya.

Menurut penuturan responden - baik yang berasal dari komunitas nelayan maupun petani lahan basah - kondisi perekonomian mereka di masa *krismon* tidak terlampau buruk jika tidak terjadi paceklik panjang atau tidak ada serangan *tungro*. Alasan mereka adalah, pada masa awal *krismon* kondisi perekonomian buruh nelayan dan buruh petani relatif stabil. Sementara itu, juragan kapal, pengusaha perikanan, pedagang pengumpul atau para orang kaya desa mengatakan bahwa periode awal krisis hingga akhir 1998 merupakan saat ketika mereka justru mendapat keuntungan besar. Namun, kondisi yang relatif cukup baik itu berangsur berubah ketika musim *paceklik* dan serangan *tungro* datang di penghujung tahun 1999.

2. Kebijakan dan Intervensi Pemerintah dalam Mekanisme Pasar

Langkah kebijakan atau intervensi yang diambil pemerintah - pada tingkat nasional dan lokal - untuk memperbaiki tingkat harga, dan mekanisme distribusi komoditas tertentu mempunyai pengaruh yang sangat bervariasi terhadap perekonomian lokal. Sebagai contoh adalah perubahan mekanisme distribusi dan penjualan pupuk. Sasaran pokok dari kebijakan yang berlaku efektif pada tahun 1998 ini adalah meniadakan hak istimewa sejumlah koperasi (KUD) yang sebelumnya berperan sebagai distributor pupuk resmi dari pabrik. Sasaran lainnya adalah upaya untuk memperbaiki harga jual pupuk yang bisa diperoleh petani.

Walaupun penerapan kebijakan baru memungkinkan distribusi pupuk lebih cepat (karena banyak “pemain” baru serta tidak ada lagi monopoli pihak KUD), tetapi pada tingkat harga ternyata masih belum menguntungkan petani. Artinya, kenaikan harga pupuk masih tetap lebih tinggi dibanding kenaikan harga gabah yang ditetapkan pemerintah. Terlepas dari masalah harga pupuk, dalam kasus KUD di Kecamatan Talang Padang, dihapusnya peran istimewa koperasi sebagai distributor resmi pabrik telah menyebabkan hilangnya keuntungan yang dapat diperoleh KUD.

Seperti KUD Pelita, misalnya, yang pernah ditetapkan sebagai salah satu koordinator distributor pupuk untuk seluruh KUD di wilayah Lampung Selatan. Peran istimewa ini

memberi keuntungan cukup besar bagi KUD yang menerima *fee* penyaluran pupuk dari pabrik. Pendapatan koperasi dari *fee* tersebut bersifat rutin dan dalam jumlah cukup besar. Selama hampir 2 tahun pendapatan terbesar KUD Pelita diperoleh dari *fee* tersebut. Dengan pendapatan itu, KUD memiliki cukup modal untuk mendanai berbagai unit usaha koperasi, antara lain unit usaha simpan-pinjam. Pada periode 1996 - 1998, unit simpan-pinjam (juga unit usaha koperasi yang lain) dapat berjalan cukup baik berkat dukungan modal dari keuntungan distribusi pupuk.

Adanya kebijakan penjualan pupuk secara bebas secara langsung telah meniadakan “pendapatan rutin” KUD. Pada gilirannya ini mempengaruhi kondisi keuangan KUD serta kegiatan sejumlah unit usaha koperasi. Dalam kasus KUD Pelita, dua unit usaha (simpan-pinjam dan unit usaha KUT non-plafon²⁹) terpaksa harus berhenti karena tidak ada lagi suntikan modal. Ketika Tim SMERU berkunjung ke KUD Pelita³⁰, 7 (tujuh) unit usaha koperasi praktis sudah tidak berjalan. Satu-satunya unit usaha yang masih berjalan adalah pembayaran rekening PLN kolektif melalui koperasi. Unit usaha ini dapat berjalan karena tidak membutuhkan dana. Menurut penuturan staf KUD Pelita, macetnya kegiatan simpan-pinjam dan KUT Non-Plafon pada akhirnya juga berpengaruh pada para petani anggota KUD. Sebab para petani ini merupakan kelompok terbesar yang memanfaatkan pinjaman (sarana produksi padi dan modal) dari dua unit usaha tersebut.

Bagaimanapun, pernyataan staf KUD Pelita mengenai berhentinya kegiatan simpan-pinjam karena ketiadaan suntikan dana dari *fee* penyaluran pupuk harus disikapi secara kritis. Penjelasan yang disampaikan oleh dua orang staf KUD pada dasarnya tidak memadai, khususnya yang berkaitan dengan penjelasan tentang manajemen koperasi serta kinerja unit simpan-pinjam. Jika pernyataan mereka dikonfrontir dengan penjelasan responden petani di Desa Kalibening, diperoleh gambaran yang cukup berbeda. Kalangan petani menyatakan bahwa keberadaan KUD selama ini tidak banyak membantu. Menurut petani, kegiatan simpan-pinjam di KUD lebih banyak dimanfaatkan oleh para pedagang komoditas pertanian atau pedagang pasar. Lebih jauh mereka juga mengungkapkan sulitnya mendapat pinjaman dari KUD untuk keperluan sarana produksi. Pinjaman yang diberikan oleh pengurus KUD umumnya hanya berlaku bagi kalangan dekat. Jika bukan termasuk kalangan dekat, petani miskin diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan yang menyulitkan atau harus memberi “uang rokok” dan biaya pelicin lain.

Pada saat pengamatan berlangsung, Tim SMERU mendapatkan gambaran kondisi yang sama di dua KUD lain di Kecamatan Talang Padang. Bahkan KUD Sumber Makmur yang berkantor di pasar Kecamatan Talang Padang sudah tidak aktif (kantor KUD telah tutup sejak awal tahun 2000). Ketika Tim SMERU mengunjungi rumah Ketua KUD hanya mendapat informasi bahwa Ketua KUD sudah berada di Medan sejak bulan Mei 2000.

²⁹ KUT Non-Plafon adalah salah satu dari 8 unit usaha yang dikelola KUD Pelita. Bentuk kegiatan unit usaha ini adalah memberikan pinjaman sarana produksi padi (khususnya pupuk) pada para petani anggota. Setiap awal musim tanam (MT), koperasi memberikan pinjaman pupuk pada petani dengan ketentuan harga pabrik. Pinjaman itu dikenakan bunga sebesar 5%/MT atau 5% untuk jangka waktu 6 bulan

³⁰ Tim SMERU hanya bisa menjumpai 2 staf KUD (Administrasi Umum dan Kasir). Ketua KUD dan Wakil Ketua sedang berada di Lampung. Situasi di kantor KUD Pelita sebenarnya sudah tidak menampakkan kegiatan rutin. Dua staf yang ditemui hanya menyelesaikan setoran pembayaran rekening listrik secara kolektif ke Bank.

Contoh kasus lain yang berkaitan dengan intervensi pemerintah pusat adalah kehadiran BPPC. Pulau Tabuan yang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh di Lampung Selatan sangat merasakan dampak kehadiran tata-niaga cengkeh. Hingga akhir 1980an, selain merupakan komoditas utama cengkeh juga merupakan sumber pendapatan terpenting masyarakat pulau Tabuan. Hancurnya harga cengkeh di pasaran membuat masyarakat pulau sangat terpukul sehingga perekonomian masyarakat lumpuh. Sejak peristiwa jatuhnya harga cengkeh itu mereka menelantarkan kebun cengkeh, dan mulai meningkatkan kegiatan penangkapan ikan dan lobster.

Penghapusan BPPC tampaknya menunjukkan gambaran mulai meningkatnya kembali harga cengkeh di pasaran bebas. Masyarakat Kota Agung dan khususnya masyarakat Pulau Tabuan pun telah menyadari gejala ini. Setahun terakhir ini, banyak warga pulau yang mulai memelihara kembali kebun cengkeh yang pernah mereka telantarkan lebih dari 10 tahun.

3. *Fluktuasi Harga Komoditas di Pasar Lokal Sektor Agraris*

Sektor agraris (pertanian, perkebunan dan perikanan) merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Tanggamus. Pada awal masa krisis hingga akhir tahun 1998 perekonomian sebagian besar masyarakat Tanggamus justru mengalami masa-masa yang menguntungkan. Petani/pemilik kebun, pedagang komoditas perkebunan (kopi, kakao dan lada), pengusaha perikanan dan nelayan pada umumnya mendapat keuntungan besar dibanding sektor lain karena harga jual komoditas perdagangan yang berlaku di pasaran lokal mengikuti nilai tukar dolar.

Sebagai ilustrasi, Haji Kelli, nasabah BRI dan pengusaha dan pedagang *lobster* sempat naik haji pada tahun 1998 berkat keuntungan yang diperoleh dari lonjakan harga lobster di pasaran internasional. Demikian pula Haji Payang sempat membuat perahu payang baru dari keuntungan hasil tangkapan ikan.

4.1. *Kebutuhan Kredit di Masa Krisis*

Dari hasil wawancara mendalam serta diskusi kelompok dengan responden, tampak jelas bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kredit - formal maupun informal - sangat tinggi. Hal ini mungkin karena adanya kombinasi dari dampak krisis serta pengaruh faktor alam. Kombinasi kedua faktor tersebut telah menyebabkan situasi perekonomian saat ini sangat menekan komunitas nelayan dan petani. Gejala yang sangat menonjol adalah merosotnya tingkat pendapatan di kedua komunitas tersebut.

4.1.1. *Kebutuhan Kredit di Komunitas Nelayan*

Kebutuhan kredit yang tinggi berlaku untuk semua strata sosial-ekonomi dalam komunitas ini. Baik *juragan* (pemilik) kapal, pedagang/pengusaha hasil laut maupun buruh nelayan/nelayan kecil menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan kredit atau modal untuk menunjang biaya operasional. Masa *paceklik* yang sudah berlangsung sekitar dua tahun, sulit dipungkiri telah menyebabkan perekonomian nelayan terpuruk. Responden di komunitas ini secara umum menyatakan bahwa sesungguhnya dampak *paceklik* bahkan jauh lebih memukul dibandingkan dengan dampak *krismon*. Yang dijadikan sebagai argumentasi mereka adalah harga jual hasil tangkapan (ikan, lobster, udang, cumi) cenderung tinggi pada masa krisis. Dengan demikian, kenaikan harga

barang pokok dan sarana produksi pada masa krisis dapat ditutup oleh nilai penjualan hasil tangkapan. Bahkan pada masa krisis justru nelayan mendapatkan keuntungan besar karena harga jual hasil tangkapan tinggi. Seperti disampaikan responden, tingkat pendapatan nelayan - di semua strata sosial-ekonomi - hingga kuartal akhir tahun 1998 cenderung meningkat. Sejak memasuki tahun 1999, saat musim *paceklik* tiba, tingkat pendapatan menunjukkan gejala penurunan signifikan. Beratnya keadaan *paceklik* ini dapat disimak dari penuturan Haji Payang *juragan* kapal berikut ini:

“Kalau musim paceklik seperti ini, kapal (jaring) payang dan pursin (purseine) sering pulang tanpa hasil. Padahal untuk biaya (operasional) satu payang Rp. 150.000,- dan pursin Rp. 350.000,-. Sekarang ini, kalau dapat hasil yang cukup untuk menutup biaya saja itu sudah bagus. Selama musim paceklik ini pendapatan tidak pernah menutup biaya. Selalu rugi. Yang kasihan itu kan awak kapal. Mereka tidak dapat penghasilan kalau biaya tidak bisa ditutup penjualan ikan. Sekarang itu, awak kapal minta “ikan makan”. Ini, artinya mereka tidak mempunyai uang untuk beli makanan. Dengan “ikan makan” itu, istri dan anak mereka bisa makan nasi dengan ikan. Tidak perlu beli. Dulu (sebelum paceklik) mereka yang sering memberi orang “ikan makan”. Buat saya ini berat. Saya juga tidak tega melihat keadaan mereka yang susah. Tapi saya sendiri juga susah. Ikan sulit didapat. Dan, saya juga punya tanggung jawab pada anak buah kapal saya. Mereka sering pinjam uang untuk keperluan sehari-hari. Saya tidak bisa menolak. Itu liat (kata responden sambil menunjuk mesin kapal di ruang tamu), ada 3 kapal saya tidak bisa melaut. Motornya rusak. Saya tidak punya uang untuk membeli as kruk (komponen mesin) yang baru. Saya juga menunggak bayar kredit BRI selama 6 bulan. Musim paceklik sekarang ini memang paling parah”

Keluhan serupa juga disampaikan oleh nelayan-nelayan perahu pancing dan nelayan udang peci dengan nada yang lebih getir. Bagi kelompok nelayan kecil ini untuk mendapat penghasilan Rp. 10.000,-/hari di masa *paceklik* tampaknya semakin sulit. Kebutuhan biaya melaut sebesar Rp. 10.000,- semakin sulit ditutup dengan hasil penjualan udang. Kenyataan pahit yang harus mereka alami setahun terakhir adalah semakin seringnya berangkat melaut dan pulang dengan tangan hampa.

Situasi ekonomi yang sulit ini secara merata dialami oleh masyarakat nelayan. Tanpa perkecualian, baik besar, menengah atau kecil semua merasakan dampaknya. Yang membuat situasi kian berat adalah lamanya musim *paceklik*. Pada saat pengamatan dilakukan, musim *paceklik* sudah memasuki tahun kedua. Jika Haji Payang terpaksa menunggak kredit BRI, maka nelayan kecil semakin terbenam dalam hutang pada patron ekonomi, warung atau pelepas uang. Kondisi inilah yang menyebabkan para nelayan di Kota Agung sangat mengharapkan adanya bantuan kredit secepatnya. Kredit atau modal produktif sangat mereka butuhkan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Sebab dengan mempunyai modal mereka bisa kembali melaut, memperbaiki prasarana produksi (mesin kapal dan jaring), serta berharap bisa mendapat penghasilan.

4.1.2. Kebutuhan Kredit di Komunitas Petani Lahan Basah

Pada komunitas ini kebutuhan kredit yang tinggi terutama sangat tampak pada strata menengah dan bawah. Harus diakui bahwa kombinasi dampak krisis dan faktor gagal panen selama empat musim tanam sangat memukul petani-petani ini. Kedua kelompok ini mengaku merasa kesulitan untuk mendapatkan modal sarana produksi. Pada

kelompok petani strata atas walaupun mereka juga mengalami dampak kombinasi krisis dan gagal panen, tetapi tingkat dampaknya tidak terlalu parah. Mereka mengalami penurunan pendapatan tetapi tidak signifikan.

Hasil wawancara mendalam dengan responden dari kelompok strata atas menunjukkan kecenderungan bahwa mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan kredit karena mereka memiliki sumber-sumber penghasilan lain. Di Desa Kalibening, elit ekonomi desa (yang jumlahnya kurang dari 10 orang), umumnya memiliki berbagai jenis usaha, antara lain: sebagai pedagang penampung komoditas pertanian di luar beras (palawija, kopi dan lada), pemilik penggilingan padi, pemilik warung yang menjual kebutuhan sehari-hari dan menyediakan sarana produksi (khususnya pupuk), bahkan ada yang memiliki usaha transportasi (bus) antar kota. Sumber penghasilan di luar beras ini selain mampu memberikan penghasilan rutin juga tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi krisis. Dengan demikian, walaupun panen padi gagal, mereka masih bisa mendapat keuntungan dari usaha menampung dan menjual komoditas pertanian dan perkebunan. Selain itu, usaha penjualan/pemberian pinjaman sarana produksi padi terus berjalan. Dalam pemberian pinjaman sarana produksi padi, kelompok strata atas komunitas petani justru “menikmati” keuntungan akibat adanya *trade off* antara harga sarana produksi pertanian dan harga gabah³¹.

Kondisi yang sebaliknya dialami oleh petani kelompok strata menengah dan strata bawah. Dua kelompok ini paling terpuak oleh adanya kombinasi dampak krisis dan serangan hama *tungro*. Nasib petani dari kalangan menengah dan bawah ini hampir mirip dengan yang dialami oleh komunitas nelayan. Dapat dikatakan selama 4 musim tanam (sekitar 2 tahun), para petani harus menerima kenyataan buruknya panen. Karena serangan *tungro*, hasil panen yang diperoleh petani hanya sekitar 20% - 30% dari rata-rata panen umumnya, atau sekitar 5 hingga 6 kuintal (gabah kering panen) per hektar. Dapat dipahami jika kondisi ini sangat menekan kehidupan perekonomian petani akibat serangan *tungro* selama 4 musim tanam, antara lain: i) tidak terbayarnya dan berakumulasinya pinjaman hutang sarana produksi; ii) hutang/pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari berakumulasi; iii) pendapatan (nilai jual hasil panen) semakin kecil dan tidak berarti. Uang perolehan hasil panen biasanya langsung habis untuk melunasi hutang. Untuk menghadapi musim tanam berikut, dengan harapan mendapat panen yang baik, solusinya hanyalah berhutang dan mencari pinjaman kembali. Dalam kondisi sedemikian, harga-harga barang kebutuhan pokok yang semakin melambung akibat krismon semakin memperparah perekonomian rumah tangga mayoritas petani Desa Kalibening.

Pada kondisi ini, adalah logis jika kebutuhan kredit/modal usaha menjadi tinggi. Masalahnya adalah dalam kondisi demikian aksesibilitas strata menengah dan bawah terhadap kredit formal relatif kecil. Sementara kehadiran program kredit yang diselenggarakan pemerintah melalui Koperasi dan LSM (misal KUT) juga tidak terlaksana secara efektif. Bahkan dalam kasus kegagalan KUT di wilayah Lampung

³¹ Terlepas dari kemungkinan berhasil atau gagalnya panen, penjualan pupuk terus berlangsung pada tingkat penjualan yang relatif sama dengan musim tanam sebelumnya. Sementara itu, harga pupuk sejak 1997 terus meningkat. Peningkatan harga pupuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan harga gabah yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengamatan diperoleh informasi bahwa harga berkisar Rp. 105 ribu – Rp. 115 ribu per 1 kuintal pupuk (campuran Urea dan SP3 dengan perbandingan 4: 2). Untuk tingkat harga itu, petani harus membayar dalam bentuk gabah kering panen sebesar 1,6 kuintal. Dengan ketetapan harga gabah lokal (saat ini) Rp. 90.000,- maka petani sesungguhnya harus membayar sekitar Rp. 144.000,- untuk 1 kuintal pupuk. Sebelum 1998, harga satu kuintal pupuk relatif dapat dibayar dengan satu kuintal gabah kering panen.

Selatan-seperti dinyatakan oleh beberapa sumber informasi di BRI dan Pemda-banyak diakibatkan oleh penyelewengan dana yang dilakukan baik oleh koperasi maupun LSM.

4.1.3 Ketergantungan Nelayan dan Petani pada Kredit Informal.

Gejala yang semakin tampak pada komunitas nelayan dan petani adalah semakin tingginya ketergantungan buruh nelayan dan buruh tani pada patron tradisional mereka atau pada kredit informal yang *notabene* sangat mudah diakses. Indikasi dari gejala ini adalah: i) membesarnya jumlah hutang biaya produksi, karena biaya produksi tidak tertutup oleh pendapatan hasil tangkapan ikan atau hasil panen; ii) kemampuan membayar hutang dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin rendah; iii) semakin tingginya frekuensi berhutang dengan nilai pinjaman yang meningkat.

Sejumlah faktor yang melatarbelakangi gejala meningkatnya ketergantungan nelayan kecil dan petani miskin pada kredit informal.

1. Kelemahan inheren kelompok miskin dan termiskin di komunitas nelayan dan petani adalah keterbatasan mereka untuk bisa mengakses kredit formal, baik koperasi terutama bank telah menetapkan persyaratan standar untuk pengajuan kredit. Sebagai persyaratan standar aspek kolateral, khususnya bila menyangkut Sertifikat Tanah/Rumah, Surat Keterangan Tanah (SKT), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), usaha yang prospektif dan jaminan berharga, merupakan “kemewahan” yang sulit disediakan oleh nelayan dan petani miskin yang merupakan mayoritas penduduk desa. Keterbatasan ini, langsung ataupun tidak, telah menjauhkan komunitas miskin dari akses terhadap kredit formal.
2. Walaupun kalangan nelayan dan petani miskin dapat menyediakan jaminan, namun terdapat keraguan dan ketakutan di mana mereka tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran. Sebagaimana diakui oleh kepala BRI Unit Desa, KUPEDDES, kredit dengan bunga relatif terendah dibanding lembaga keuangan formal lain di desa, masih menetapkan tingkat bunga komersial. Kenyataan ini bukannya tidak diketahui para petani. Hal inilah yang semakin menguatkan kekhawatiran mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga komersial. Di samping itu, nelayan atau petani juga sadar bahwa pendapatan mereka sulit dipastikan.
3. Karena tak ada kepastian mengenai pendapatan, kebanyakan kalangan nelayan dan petani tidak mampu menyesuaikan pendapatan mereka dengan sistem angsuran yang ditetapkan bank.
4. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari kalangan nelayan dan petani miskin tampak enggan (bahkan takut) berinteraksi dengan lembaga keuangan formal. Perasaan rendah diri ini dapat dimaklumi mengingat mereka kurang atau tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan formal. Sebagai misal, para petani kecil jarang sekali terlibat langsung dalam penyelesaian urusan administratif pengajuan kredit, bahkan dengan program-program kredit pertanian. Dalam program KUT, anggota kelompok (petani miskin) hanyalah anggota pasif yang tidak mengetahui berbagai proses penyelesaian urusan administratif. Urusan ini umumnya ditangani oleh Ketua Kelompok dan PPL (atau anggota LSM), sedang anggota hanya menerima uang. Para responden petani miskin di Desa Kalibening umumnya sulit menjawab ketika ditanya

mengenai proses mereka bisa mendapat KUT. Mereka juga sulit menjawab pertanyaan tentang seberapa besar seharusnya masing-masing anggota kelompok berhak menerima uang, dst.

5. Ketidakmampuan atau keengganan skema kredit formal untuk menjangkau masyarakat lapis bawah di pedesaan sebaliknya dapat dipenuhi oleh *keluwesan* skema kredit informal. Semua kelemahan skema kredit formal justru merupakan kelebihan kredit informal dalam menjangkau nelayan dan petani miskin. Skema kredit formal seperti KUPEDDES, misalnya, tampaknya memang hadir hanya untuk melayani kalangan mampu di pedesaan. Sementara kredit informal mampu memahami kebutuhan nelayan dan petani miskin baik dalam arti sosial juga psikologis dan mengakomodasi siklus aktifitas ekonomi mereka.
6. Dalam hubungan patron-klien yang bersifat tradisional di antara nelayan dan petani miskin dengan *juragan*, elit ekonomi desa atau warung tidak dapat diabaikan adanya nuansa sosial dan saling ketergantungan yang sudah berlangsung lama. Hubungan ini tidak mudah diputus dengan suatu pengenalan program kredit baru tertentu yang menafikan sifat hubungan patron-klien yang unik.

V. KESIMPULAN

5.1. Dampak Krisis terhadap Keberadaan Kredit Pedesaan

Hasil pengamatan secara umum menunjukkan bahwa dampak krisis terhadap keberadaan kredit pedesaan (di wilayah pengamatan) tidak bersifat signifikan. Yang dimaksud dalam kaitan ini adalah: i) tidak ditemui perubahan berarti dari sisi jumlah lembaga keuangan yang dapat menyediakan skema kredit formal. ii) Tidak ditemui adanya skema-skema kredit baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan pedesaan di masa krisis. Uraian pokok-pokok kesimpulan mengenai dampak krisis terhadap kredit pedesaan adalah sbb.:

- 1) Pada masa krisis, khususnya pada periode 1997 - 1999, tidak terlihat perubahan situasi yang berarti menyangkut keberadaan lembaga keuangan formal (bank dan koperasi) serta jumlah skema kredit yang ditawarkan. Perkiraan awal bahwa pada masa krisis mungkin mendorong munculnya lembaga keuangan formal non-bank (seperti koperasi, *credit union*, dll) ternyata tidak ditemui di wilayah pengamatan. Hasil pengamatan justru menemukan 2 koperasi (KUD) yang mengurangi kegiatannya (meniadakan unit simpan-pinjam), bahkan juga ditemui sebuah KUD yang tidak aktif lagi. Namun demikian didapat kasus menarik di Desa Kalibening, khususnya menyangkut pendirian Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) di bawah binaan Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan tahun pendirian, USPS tersebut memang dibentuk pada masa krisis, namun dari sisi tujuannya, lembaga keuangan itu sebenarnya dimaksudkan untuk membantu komunitas petani miskin agar terlepas dari jeratan para pelepas uang/tengkulak.
- 2) Jenis skema kredit yang disediakan oleh lembaga formal, khususnya bank cenderung tetap. Tidak ditemui adanya skema kredit formal baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan pada masa krisis. Berkaitan dengan skema kredit formal, juga ditemui kecenderungan dari pihak lembaga keuangan untuk meningkatkan sikap kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

- 3) Akses masyarakat perdesaan pada kredit formal pada umumnya kecil. Kredit formal yang ada umumnya hanya bisa diakses oleh kalangan masyarakat desa yang secara ekonomi mapan.
- 4) Peran KUD dalam penyaluran kredit dapat dikatakan rendah. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa tidak satu pun KUD yang masih beroperasi (saat kunjungan berlangsung) memiliki unit simpan-pinjam yang aktif. Kelemahan manajemen keuangan dan beragam kecenderungan praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih kuat mewarnai mekanisme simpan-pinjam di lingkungan koperasi.
- 5) Temuan lapangan menunjukkan kecenderungan di mana jenis-jenis kredit khusus (kredit program) yang disediakan oleh pemerintah melalui KUT, PDM-DKE, P3DT tidak efektif. Keberadaan kredit program tersebut justru hanya membuka peluang terjadinya penyelewengan di kalangan pengelola program. Ditinjau dari sisi penerima manfaat program (*beneficiaries*) manfaat program juga sangat kecil.
- 6) Kredit informal menunjukkan kecenderungan diminati oleh kalangan nelayan dan petani miskin. Gejala ini mungkin terjadi akibat kekakuan persyaratan yang ditetapkan oleh kredit formal serta keterbatasan kemampuan kalangan petani dan nelayan miskin dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit formal. Berkaitan dengan gejala ini, temuan lapangan juga mendapati kecenderungan di mana semakin banyak kalangan nelayan dan petani miskin yang terjebak dalam mekanisme kredit pelepas uang, tengkulak atau patron ekonomi tradisional mereka.
- 7) Dampak Krisis terhadap Kinerja Kredit Perdesaan sulit untuk diketahui karena adanya pengaruh faktor eksternal lain yang berpengaruh pada dinamika perekonomian masyarakat desa baik di tingkat komunitas maupun rumah tangga.
 - Secara umum seluruh responden, kecuali responden dari kalangan petani kaya, mengakui bahwa kondisi perekonomian rumah tangga mereka mengalami tekanan yang berat.
 - Turunnya tingkat pendapatan secara drastis karena pengaruh *paceklik* (untuk komunitas nelayan) dan adanya serangan hama *tungro* (untuk komunitas petani)

5.2. Jenis Kredit yang Diminati Masyarakat

- 1) Bagi kalangan masyarakat desa yang secara ekonomis tergolong mapan umumnya memilih KUPeDES (BRI). Pertimbangan utama pemilihan skema kredit formal itu antara lain adalah: a) kemudahan pemenuhan persyaratan; b) bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan formal lain; c) (di wilayah pengamatan) BRI Unit Desa relatif paling mudah dijangkau.
- 2) Kalangan responden nelayan sangat berharap adanya skema kredit khusus bagi mereka. Yang dimaksud sebagai skema kredit khusus adalah kredit dengan persyaratan dan mekanisme yang dapat disesuaikan dengan siklus penghasilan mereka.
- 3) Masalah persyaratan pinjaman, khususnya aspek kolateral, merupakan kendala terbesar bagi mayoritas masyarakat desa lapisan menengah ke bawah. Sementara kebutuhan pinjaman kredit untuk kegiatan produktif sangat tinggi. Berkaitan dengan hal ini, kalangan nelayan dan petani miskin sangat mengharapkan adanya skema kredit formal dengan persyaratan kolateral yang lebih luwes.
- 4) Tingkat suku bunga seperti yang ditetapkan oleh KUPeDES BRI (1,5% - 2%/bulan), dapat dikatakan sebagai tingkat suku bunga yang pantas dan tidak terlampaui memberatkan komunitas nelayan atau pun petani. Namun dalam kaitan itu mencuat adanya harapan untuk penetapan suku bunga yang lebih ringan.

Lampiran 1. Skema Kredit di Wilayah Pengamatan Dusun Kapuran Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung

No	Nama Program (berdasarkan Desa)	Tahun Mulai	Bunga	Jangka waktu	Jangka Angsuran	Pinjaman /orang (Rp.)	Total Peminjam	Total Dana (Rp.)
Dusun Kapuran								
A	Kredit Formal							
1.	BRI (KUPeDES)	1980an	Flat 1,5%/bln	1 – 3 tahun	Bulanan	1 – 25 juta	*)	*)
	Golbertap	1980an	Flat 1,5%/bln	1 – 3 tahun	Bulanan	1 – 25 juta	*)	*)
2.	BPD (Kredit Usaha Produktif)	1980an	1,5% – 2%/bln	1 – 3 tahun	Bulanan	1 – 10 juta	*)	*)
3.	KOPPAS	1985	2%/bulan	10 minggu	Mingguan	Min. 500.000,-	± 130	± 500 juta
4.	KUD-Mina**)	1980an	2% – 5%/bulan	1, 2, 3 bulan	Mingguan	100.000 – 500.000	*)	*)
B	Kredit Program							
1.	PDM-DKE	1998 - 1999	0	Hingga lunas	Tidak ada ketentuan	100.000 – 300.000	± 20 kelompok	*)
C	Kredit Informal							
1.	Warung	Sudah lama	20% – 30%	Hingga lunas (rata-rata < 1 minggu)	Harian; seadanya uang	50.000 – 500.000	20 – 30 langgan	Terbatas (10.000 – 100.000)
2.	Kelompok Arisan	Sudah lama	20% – 30%	2 – 4 minggu	Tak ada ketentuan/sekaligus	50.000 – 500.000	1 – 3 orang setiap putaran arisan	Terbatas (50.000 – 500.000)
3.	Juragan Kapal	Sudah lama	20% – 30%	Hingga lunas (tidak ada batasan waktu)	Tak ada ketentuan/sekaligus	50.000 – 500.000	20 – 30 orang	
4.	Rentenir	Sudah lama	40%	30 – 40 hari	Harian	50.000 – 250.000	± 50 orang	Terbatas (1 – 5 juta)

Catatan:

*) Tidak diketahui

**) Kegiatan unit simpan-pinjam sudah tidak aktif sejak tahun 1999 akibat kredit macet dan/atau diputihkan

Lampiran 2. Skema Kredit di Wilayah Pengamatan Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang

No	Nama Program (Berdasarkan Desa)	Tahun Mulai	Bunga	Jangka Waktu	Jangka Angsuran	Pinjaman /Orang (Rp.)	Total Peminjam	Total Dana (Rp.)
Desa Kalibening								
A	Kredit Formal							
1.	BRI (KUPEDES)	1980an	Flat 1,5%/bln	1 – 3 tahun	Bulanan	1 – 25 juta	*)	*)
2.	Golbertap	1980an	Flat 1,5%/bln	1 – 3 tahun	Bulanan	1 – 25 juta	*)	*)
3.	BPD (Kredit Usaha Produktif)	1980an	1,5% – 2%/bln	1 – 3 tahun	Bulanan	1 – 10 juta	*)	*)
4.	USPS	1999	Tergantung paket pinjaman	1 MT	Dibayar lunas tiap panen	250.000,-	± 130	± 65 juta
B	Kredit Program							
1.	PDM-DKE	1998 – 1999	0	Hingga lunas	Tidak ada ketentuan	100.000 – 300.000	± 20 orang	*)
2.	KUT	1998 – 1999	± 2%	1 MT	Tergantung kesepakatan kelompok tani	850.000 (yang diterima)	± 40 orang	20 Milyar (untuk 400 kelompok tani)
C	Kredit Informal							
1.	Warung	Sudah lama	10% – 20% (keuntungan)	Hingga lunas (1 bln)	Harian; seadanya uang	10.000 – 100.000	20 – 30 langgan	1 – 2 juta
2.	Kelompok Arisan	Sudah lama	20% – 30%/bln	2 – 4 minggu	Tak ada ketentuan/sekaligus	50.000 – 500.000	1 – 3 orang setiap putaran	250.000 – 2 juta
3.	Pengusaha Desa/Elit Ekonomi desa	Sudah lama	20% – 30%	Hingga lunas	Tak ada ketentuan/sekaligus	50.000 – 200.000	20 – 30 orang	3 – 10 juta
4.	Rentenir	Sudah lama	40%	30 – 40 hari	Harian	50.000 – 250.000	± 50 orang	Terbatas (1 – 5 juta)
5.	Lambung Masjid	Akhir 1980an	Sukarela	1 MT	1 MT	20 – 40 liter beras	± 50 orang	*)
6.	Ijon/Tengkulak	Sudah lama	30% – 40%	1 – 3 bulan	Tergantung kesepakatan	100.000 - > 1 juta	*)	*)

Catatan:*) Tidak diketahui